

**Pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran
Pemerintah, dan Harapan Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa
pada Tahun 2018-2024**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Dina Ayu Atika
Nim : 22313016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2026

Pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan
Harapan Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2024

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Dina Ayu Atika

Nim : 22313016

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2026

Penulis,



Dina Ayu Atika

PENGESAHAN

Pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Harapan Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2024

Nama : Dina Ayu Atika
Nim : 22313016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 27 April 2026

Telah disetujui dan di sahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Prof. Drs. Agus Widarjono, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 933130103

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2024

Disusun oleh : DINA AYU ATIKA

Nomor Mahasiswa : 22313016

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 10 Juni 2026

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D

Penguji : Dr. Sahabudin Sidiq, M. A.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta limpahan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Harapan Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2024” dapat diselesaikan dengan baik. Berkat kehendak dan pertolongannya, seluruh rangkain penyusunan skripsi ini dapat berjalan dari tahap awal hingga tahap akhir tanpa hambatan yang tidak dapat diatasi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh, sekaligus sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Dalam proses penyusunannya, berbagai kendala dan keterbatasan tidak dapat dihindari, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan hasil penelitian. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, serta kesabaran kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga selesai menyusun skripsi ini.
2. Yth. Bapak Prof. Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
3. Yth. Bapak Abdul Hakim S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
4. Yth. Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq S.E., MA. Selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
5. Yth. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono MA., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dalam membimbing, dan memberikan arahan yang sangat berarti, serta dukungan

penyakit di tengah kesibukan beliau, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lebih terarah, baik, dan tepat waktu.

6. Yth. Ibu Diana Wijayanti S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, serta nasihat selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir studi, serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai kendala akademik.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Jahidi dan Ibu Narikha, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Berkat cinta dan perjuangan beliau berdua, penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
8. Kakak dan Adik tercinta, Mas Riski Putra Hendriawan dan Dede Khafiza Kaera Azmi yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta menjadi sumber motivasi dalam setiap proses yang penulis jalani selama masa perkuliahan.
9. Keponakan tercinta Arroyan Dylan Alfarisqi, yang selalu menghadirkan keceriaan, semangat, serta menjadi salah satu penghibur di tengah proses penyusunan skripsi, sehingga penulis merasa lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat penulis selama masa perkuliahan dari semester satu hingga semester delapan ini, R.A. Syania Irawan, Hana Arista Putri, Muhammad Hisyam Rabbani, Rianda Lintang Gumelar, Muhammad Jiddan Khairuzaman. Yang senantiasa hadir dalam suka maupun duka, memberikan dukungan, bantuan, diskusi hingga lomba bersama, serta menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis selama masa perkuliahan.
11. Teman dan sahabat selama penulis berada di Kos IA tercinta, Intan Na'ilah Saadati, Fadila Sauqie Ramadhani, As Syeira Yaffa T.F. yang selalu memberikan suasana kekeluargaan, kebersamaan, bantuan, serta dukungan dalam kehidupan sehari-hari selama masa perkuliahan dan perantauan.
12. Kedua teman saya dari kepanitiaan Pesona Ta'aruf 2024, Atilla dan Zahra yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, kerja sama tim, dan pembelajaran berharga yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta tetap saling mendukung hingga saat ini.

13. Teman-teman magang dari UMY selama magang di KPPU, Rica, Reva, Nando, dan Raihan, yang telah bersama-sama melewati proses pembelajaran di dunia kerja, memberikan pengalaman baru, serta saling mendukung selama proses magang berlangsung hingga saat ini.
14. Teman-teman sejurusan, seangkatan, dan adik tingkat yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan, baik melalui diskusi akademik, bantuan maupun kebersamaannya selama masa perkuliahan.
15. Kepada diri sendiri Dina Ayu Atika, yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi segala tantangan, tekanan, serta proses panjang selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena telah tetap melangkah hingga berada di titik ini.

Sebagai penutup, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kemudahan, serta keberkahan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda yang terus mengalir manfaatnya, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan penulis di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang ekonomi serta menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 13 Mei 2026

Penulis,



Dina Ayu Atika

DAFTAR ISI

<i>SKRIPSI</i>	<i>i</i>
<i>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</i>	<i>ii</i>
<i>PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>PENGESAHAN UJIAN</i>	<i>iii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>v</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>viii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>xi</i>
<i>DAFTAR GRAFIK</i>	<i>xii</i>
<i>DAFTAR LAMPIRAN</i>	<i>xiii</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>xiv</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	11
<i>BAB II</i>	<i>13</i>
<i>KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</i>	<i>13</i>
2.1. Kajian Pustaka.....	13
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Kemiskinan	16
2.2.2. Dana Desa.....	18

2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20
2.2.4. Pengeluaran Pemerintah	25
2.2.5. Harapan Lama Sekolah (HLS)	28
2.3. Hipotesis Penelitian.....	30
2.4. Kerangka Penelitian.....	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	33
3.2. Definisi Variabel Opsional.....	33
3.2.1. Variabel Dependen (Y).....	34
3.2.2. Variabel Independen (X)	34
3.3. Metode Analisis.....	36
3.3.1. <i>Common Effect Model</i> (CEM)	36
3.3.2. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	37
3.3.3. <i>Random Effect Model</i> (REM).....	38
3.4. Pemilihan Model.....	39
3.4.1. Uji F (Chow Test)	39
3.4.2. Uji Lagrange Multiplier (LM Test).....	40
3.4.3. Uji Hausman.....	41
3.5. Pengujian Statistik	41
3.5.1. Koefisien Determinasi (R-Squared)	42
3.5.2. Uji Simultan (Uji F)	42
3.5.3. Uji Parsial (Uji t).....	43
BAB IV.....	45
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Deskripsi Data Penelitian	45
4.2 Pengujian Model Regresi.....	46
4.2.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	46

4.2.2 <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	47
4.2.3 Random Effect Model (REM)	48
4.3 Uji Pemilihan Model.....	48
4.3.1 Uji Chow	48
4.3.2 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	49
4.3.3 Uji Hausman	50
4.4 Analisis Hasil Regresi.....	50
4.4.1. Koefisien Determinasi (R-Squared)	50
4.5 Interpretasi Hasil	52
4.5.1 Hubungan Dana Desa Terhadap Kemiskinan	52
4.5.2 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan.....	53
4.5.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan.....	53
4.5.6 Hubungan Harapan Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan.....	54
<i>BAB V</i>	56
<i>SIMPULAN DAN IMPLIKASI</i>	56
5.1. Simpulan.....	56
5.2. Implikasi	57
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	60
<i>LAMPIRAN</i>	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018-2024	2
Tabel 1. 2 Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2018-2024 (dalam ribu jiwa)...	3
Tabel 3. 1 Deskripsi Variabel.....	33
Tabel 4. 1 Deskripsi Data Statistik.....	45
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)	46
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM).....	47
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Random Effect Model (REM).....	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow	49
Tabel 4. 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	49
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman	50
Tabel 4. 8 Hasil Estimasi fixed effect model.....	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Perkembangan Dana Desa Tahun Anggaran 2015—2024	5
Grafik 1. 2 Tren Korupsi di Sektor Desa	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Persentase Penduduk Miskin, Dana Desa, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Dan HLS Pada 80 Kabupaten Tahun 2018-2024	63
Lampiran 2 Hasil Uji Common Effect	82
Lampiran 3 Hasil Uji Fixed Effect	83
Lampiran 4 Hasil Uji Random Effect.....	84
Lampiran 5 Hasil Uji Chow.....	85
Lampiran 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier	86
Lampiran 7 Hasil Uji Hausman	87
Lampiran 8 Hasil Intercept	88

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Harapan Lama Sekolah terhadap Kemiskinan pada 80 kabupaten yang ada di Pulau Jawa selama periode tahun 2018 – 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan software Eviews 12. Melalui hasil analisis regresi, model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM), yang menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sementara itu PDRB, pengeluaran pemerintah, dan harapan lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung program penurunan kemiskinan di Pulau Jawa.

Kata kunci: *Kemiskinan, Dana Desa, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Harapan Lama Sekolah, Pulau Jawa*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama dalam perkembangan ekonomi dunia, yang bersifat luas dan memiliki banyak aspek. Jika melihat dari sudut pandang pembangunan, kemiskinan bukan hanya terkait pada rendahnya pendapatan saja, namun juga mencakup pada tidak mampunya mengakses pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak (World Bank, 2022). Hal tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah sosial dan struktural.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kemiskinan bukan hanya dipandang sebagai kurangnya tingkat pendapatan saja, melainkan sebagai masalah kompleks yang mencakup dimensi utama kehidupan manusia, seperti akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, standar hidup, dan partisipasi sosial (UNDP, 2016). Siklus kemiskinan yang memburuk dan terus berlanjut yang menghambat pertumbuhan ekonomi juga bisa disebabkan oleh ketidakmerataan akses terhadap sumber daya. Pada tahun 2023, sekitar 1.1 miliar manusia hidup dalam kemiskinan multidimensional dengan frekuensi tertinggi di Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan (UNDP, 2023). Secara simultan hal tersebut berpengaruh terhadap kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang kemudian akan menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah struktural yang selalu menjadi fokus utama dalam kegiatan pembangunan nasional dan sampai saat ini masih menjadi tantangan besar Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Penyebab kemiskinan di Indonesia paling sering disebabkan oleh akses terhadap ekonomi yang tidak merata dan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Adanya hubungan sebab-akibat yang berulang antara produktivitas, investasi, dan rendahnya pendapatan yang menyebabkan kemiskinan, menurut teori lingkaran setan kemiskinan (Nurkse, 1953). Kondisi tersebut yang kemudian membuat sulit untuk keluar dari

kemiskinan jika tanpa tindakan kebijakan yang tepat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan hendaknya memiliki kemampuan untuk bisa menghentikan siklus tersebut. Pada kenyataannya, banyak dari negara-negara yang terus menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018-2024

Tahun	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase (%)
2018	25.949	9.82
2019	25.144	9.41
2020	26.424	9.78
2021	27.542	10.14
2022	26.161	9.54
2023	25.898	9.36
2024	25.219	9.03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan jumlah kemiskinan nasional mengalami penurunan dari tahun 2018 yang kemudian naik kembali tinggi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19, kemudian menurun kembali setelah ekonomi pulih pasca-pandemi. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan ekonomi makro yang terjadi, karena meskipun jumlah dan persentase kemiskinan mengalami penurunan, tetapi garis kemiskinan mengalami peningkatan selama periode penelitian, yang mengindikasikan bahwa standar hidup minimum masyarakat Indonesia juga meningkat.

Angka kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 9.03% atau 25.22 juta jiwa, turun dari tingkat kemiskinan pada tahun 2023 yang semula berada di angka 9.36% atau 25.90 juta jiwa. Jumlah kemiskinan pada tahun 2024 ini memperlihatkan angka yang relatif mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19 dengan yang berdampak paling tinggi berada di tahun 2020 hingga 2021 (BPS, 2024). Pertumbuhan ekonomi setelah pandemi dan beberapa program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BLT), dan kartu pra kerja secara signifikan telah

mendorong penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Assyafaah et al., 2025).

Di Indonesia, kemiskinan menunjukkan perbedaan yang mencolok antar daerah/provinsi maupun antara perkotaan dan pedesaan. Salah satu yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia tinggi adalah ketimpangan regional/wilayah yang cukup besar. Tingkat pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan distribusi pendapatan yang berbeda antar provinsi lah yang menunjukkan disparitas ini. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan pemerataan pembangunan, investasi, dan pemerataan pendapatan antar daerah, ketimpangan antar wilayah akan muncul (Ginting, 2015).

Daerah yang mempunyai banyak pusat bisnis cenderung mampu berkembang lebih cepat jika dibandingkan dengan daerah tertinggal. Didukung oleh perbedaan kapasitas fiskal antar daerah yang menyebabkan ketimpangan pembangunan lebih terlihat nyata, karena daerah dengan pendapatan yang tinggi relatif lebih bisa untuk membiayai pembangunan, yang pada akhirnya ketidaksamaan ini kemudian berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di antara daerah-daerah tertentu. Namun, pada kenyataannya dominasi ekonomi tersebut tidak serta merta mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sama. Sebaliknya, hal ini mencerminkan adanya ketidakmerataan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi hasil pembangunan. Pulau Jawa menjadi contoh nyata dari fenomena pertumbuhan yang belum sepenuhnya inklusif.

Tabel 1. 2 Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2018-2024 (dalam ribu jiwa)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	3.615	3.399	3.920	4.195	4.070	3.888	3.848
Jawa Tengah	3.897	3.743	3.980	4.109	3.831	3.791	3.704
Jawa Timur	4.332	4.112	4.419	4.572	4.181	4.188	3.982
Banten	661	654	775	867	814	826	791

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pusat ekonomi Indonesia sampai saat ini masih “Jawa Sentris” dengan terus memberikan kontribusi sebesar 57.04% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia (Irawati, 2024). Dengan pusat kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang lebih unggul jika dibandingkan daerah lain di Indonesia, Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menyumbang lebih dari setengah PDB nasional, (BPS, 2024). Sebaliknya, menurut data Badan Pusat Statistik, meskipun Jawa memainkan peran yang krusial dalam perekonomian Indonesia, dari tabel 1.2 terlihat bahwa sebagian besar penduduk miskin Indonesia justru tinggal di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten yang keempat provinsi tersebut penyumbang angka kemiskinan terbesar di Pulau Jawa. Hal tersebutlah yang mengakibatkan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan masih tinggi meskipun secara data dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia relatif rendah dan signifikansi mengalami penurunan.

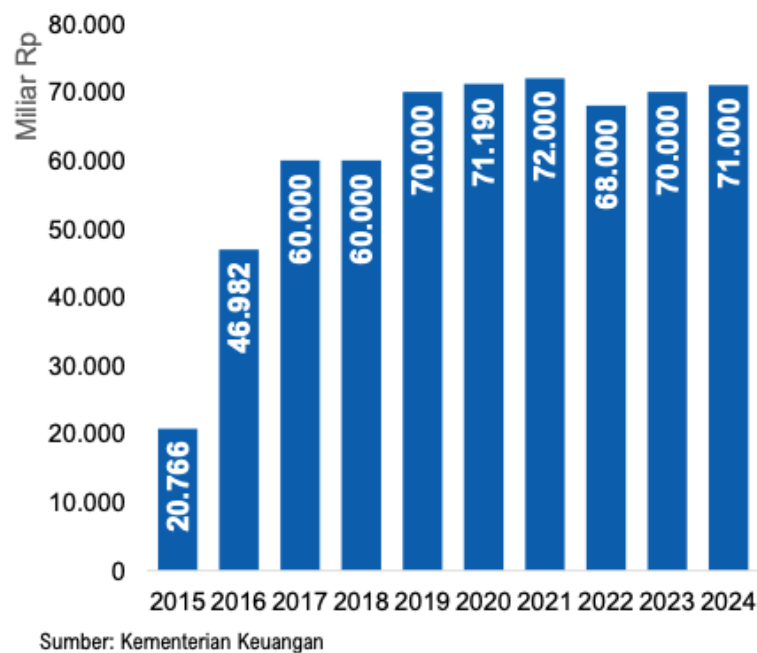
Banyaknya penduduk di Pulau Jawa menyebabkan tingkat kemiskinan absolut di empat provinsi tersebut tetap tinggi meskipun angka persentasenya relatif sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Beberapa penyebab ketimpangan yang signifikan ini antara lain seperti, masih minim dan sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak masih terbatas di berbagai daerah di pedesaan Jawa. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan kemiskinan di sebagian besar provinsi Pulau Jawa memiliki karakteristik yang kompleks dan ketidakmerataan. Menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah tidak serta merta setara dengan konsentrasi ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Kuznets (1955) dalam teori pertumbuhan ekonomi tradisional, menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan terjadi akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan ekonomi yang kemudian secara bertahap akan menurun kembali seiring dengan waktu berjalan. Inilah yang terjadi di Pulau Jawa, dimana ketika angka pertumbuhan ekonomi meningkat karena di dorong oleh kota-kota besar dan adanya industri, justru manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara lengkap dan luas terutama oleh masyarakat di pedesaan dan yang berada di sektor informal.

Ketimpangan kesejahteraan di Pulau Jawa semakin di perparah oleh hal tersebut yang mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2021) menjelaskan dana desa adalah dana dari APBN yang diberikan kepada desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini digunakan guna membiayai pemerintahan, kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diberikan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bagian dari komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, mandiri, maju, dan demokratis. Dengan bantuan dana ini, desa diharapkan mampu mengembangkan dan memberdayakan diri mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (DJPb, 2021)

Grafik 1. 1 Perkembangan Dana Desa Tahun Anggaran 2015—2024

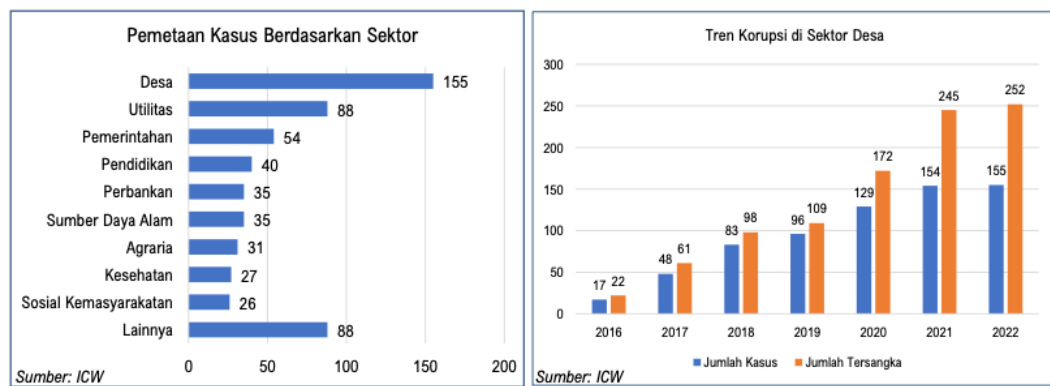


Sumber: Updesa.com

Keberadaan dana desa ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah melalui pembangunan yang didasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung aktivitas masyarakat desa. Pemerintah menetapkan penggunaan dana desa dilakukan untuk memperbaiki layanan publik, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan untuk mempermudah akses pemberdayaan ekonomi lokal (DJPb, 2021)

Grafik 1. 2 Tren Korupsi di Sektor Desa



Sumber: Updesa.com

Namun demikian, banyak masalah masih saja terus muncul dalam penggunaan dana desa di kehidupan nyata, yang kemudian akan memberikan dampak negatif pada kinerja dari dana desa itu sendiri. Salah satu yang menghambat efektivitas penggunaan dana desa adalah karena rendahnya tingkat penyerapan anggaran di beberapa daerah, yang disebabkan oleh kekurangan kemampuan administrasi dan perencanaan di tingkat desa. Selain itu, masalah besar lainnya juga karena kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya, yang memungkinkan atau rentan adanya penyalahgunaan dana yang sangat besar.

Efektivitas dana desa dalam menanggulangi kemiskinan masih belum memberikan efek yang positif, dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa penerapan dana desa masih tidak tepat sasaran dan kurang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sehingga dana desa belum memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan (Deviyanti et al., 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran yang signifikan tidak selalu berkorelasi dengan hasil yang optimal. Masalah lainnya adalah karena dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik dibandingkan untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Mengakibatkan efek terhadap peningkatan kesejahteraan yang tidak lebih besar dari yang sebelumnya. Evaluasi yang mendalam terkait penggunaan dana desa sangat

diperlukan. Oleh karena itu penelitian tentang pengaruh dana desa, terutama dari tahun 2018 hingga tahun 2024 dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan ini benar-benar dapat mengurangi kemiskinan di Pulau Jawa.

Salah satu indikator lain untuk mengukur tingkat kemiskinan dan kinerja ekonomi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara konsep, PDRB menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah administratif selama periode waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2024) PDRB dapat digunakan untuk mengukur kapasitas produksi dan perkembangan ekonomi dalam suatu daerah. Nilai PDRB suatu daerah sebanding dengan potensinya untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif. Nilai PDRB juga sering digunakan oleh pemerintah untuk menjadi acuan dalam membuat kebijakan pembangunan daerah karena PDRB bisa mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah. Dalam hubungan pembangunan ekonomi, PDRB adalah indikator yang bukan hanya menunjukkan jumlah output ekonomi saja, tetapi sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang kemudian dapat dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan output daerah mampu menyebabkan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut (Todaro & Smith, 2020). Karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi, perusahaan cenderung meningkatkan aktivitas produksi juga yang kemudian akan menciptakan lapangan kerja baru, yang memungkinkan orang yang berpendapatan rendah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Selain karena itu, meningkatnya pendapatan daerah juga bisa memberi pemerintah lebih banyak uang untuk membiayai program-program sosial dan memperluas pembangunan sebagai akses utama kegiatan perekonomian daerah.

Meskipun demikian, hubungan antara peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tidak selalu linier. Pada nyatanya, tingkat kemiskinan tidak selalu akan menurun jika pertumbuhan ekonomi atau PDRB meningkat. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, menurut Kuznets (1955), peningkatan ketimpangan

pendapatan di suatu daerah seringkali diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi ketika keuntungan dari adanya ekspansi ekonomi terkonsentrasi pada industri kontemporer yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Mengakibatkan, masyarakat miskin tidak secara langsung mendapatkan manfaat dari adanya peningkatan aktivitas ekonomi tersebut. Dalam situasi yang seperti itu, kemajuan ekonomi hanya dapat menghasilkan peningkatan output tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya PDRB memiliki pengaruh yang beragam terhadap tingkat kemiskinan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2022) menunjukkan bahwa pengaruh PDRB menjadi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan ketika pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada suatu sektor atau adanya ketidakmerataan pertumbuhan antar wilayah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi di masing-masing daerah.

Pulau Jawa merupakan daerah dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian nasional, jumlah besar yang diberikan oleh Pulau Jawa melalui PDRB menunjukkan betapa aktifnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Namun tetapi, meskipun kontribusi yang diberikan kepada negara termasuk paling besar, sebagian daerah kabupaten di Pulau Jawa masih menjadi daerah termiskin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu mampu mengatasi kemiskinan di daerah secara merata. Salah satu penyebabnya karena adanya konsentrasi pertumbuhan di beberapa daerah dan sektor tertentu sementara daerah lain tertinggal jauh.

Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh PDRB. Belanja pemerintah ditujukan untuk sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Belanja pemerintah digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Shoup, 1959). Belanja pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan konektivitas dan produktivitas kegiatan ekonomi, sementara itu,

belanja pemerintah yang digunakan untuk sektor kesehatan dan pendidikan ditujukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah. Peningkatan kualitas layanan publik mampu meningkatkan peluang masyarakat untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Karenanya, jumlah dan kualitas dari belanja yang dilakukan pemerintah sangat andil dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan. Anggaran pemerintah tidak berfungsi hanya sebagai sumber pembiayaan melainkan juga untuk alat kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan yang sama untuk masing-masing daerah.

Selain itu, keberhasilan belanja pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan sangat bergantung pada rencana anggaran yang disusun dan diterapkan. Secara teori, meningkatnya belanja pemerintah pada sektor-sektor produktif berguna untuk mempercepat menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar dan penciptaan terhadap peluang ekonomi (Todaro, 2020). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Panggabean & Matondang (2019) menunjukkan bahwa tidak selamanya pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama jika tidak diikuti sertakan dengan tata kelola daerah yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah tidak mampu untuk menjamin berhasilnya tingkat kemiskinan menurun. Pengeluaran yang efektif sangat dipengaruhi oleh sasaran yang tepat, efisiennya penggunaan anggaran, dan kualitas dari program yang dilaksanakan.

Dalam kenyataannya, banyak permasalahan yang terkait dengan ketidakefisienan dan keefektifan penggunaan anggaran pemerintah daerah yang masih ada. Ketika anggaran yang dialokasikan tidak digunakan secara efektif atau tidak menghasilkan output yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan menyebabkan ketidakefisienan. Seringkali anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak dialokasikan untuk kegiatan yang benar-benar menghasilkan manfaat atau dampak langsung terhadap masyarakat. Karena keadaan tersebut, banyak program yang akhirnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah lebih sering digunakan untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja modal yang produktif (World Bank, 2020).

Yang mengakibatkan, pengeluaran pemerintah tidak sepenuhnya berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain pentingnya pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal untuk mengurangi angka kemiskinan, kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor yang utama dalam pembangunan. Untuk menilai kualitas hidup dari masyarakat, menggunakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS). Menurut (UNDP, 2024), IPM terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, umur panjang dan sehat, serta standar hidup yang layak. Dimensi tersebut diukur menggunakan indikator harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan riil perkapita. Dari pengukuran indikator tersebut, IPM tidak hanya menjelaskan kondisi ekonomi saja, tetapi juga menjelaskan kualitas pembangunan manusia secara eksplisit. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan adalah angka harapan lama sekolah.

Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan ketika adanya peningkatan kualitas dan lamanya pendidikan maka akan diikuti dengan peningkatan produktivitas masyarakat dan memperluas peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak maupun lebih tinggi. Menurut Todaro (2020), investasi yang ditujukan pada sumber daya manusia adalah kunci untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dengan melalui perkembangan kemampuan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik. Selain hal tersebut, pekerjaan layak dan pendapatan yang stabil akan relatif mudah di akses oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, meningkatnya HLS akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selain daripada itu, penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Ariana (2024) mengemukakan bahwa Harapan Lama Sekolah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, tersusunlah rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa?
5. Bagaimana pengaruh Dana Desa, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan HLS secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tersusun diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa
2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa
4. Untuk menganalisis pengaruh Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa
5. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan HLS secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa

1.3.2. Manfaat Penelitian

Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menamatkan studi dan meraih gelar sarjana strata satu dari Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Harapannya penelitian

ini akan menambah wawasan dan gambaran tentang bagaimana peran dana desa, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan harapan lama sekolah terhadap kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan akan berfungsi sebagai media dan sarana untuk penerapan dan analisis teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dalam konteks ekonomi.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian akademisi lainnya dan bisa menjadi acuan literatur untuk peneliti lain di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah terkait dalam hal untuk mengembangkan bahan pertimbangan kebijakan yang dapat menurunkan angka kemiskinan dari variabel-variabel terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Deviyanti et al., (2025) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah”. Dengan tujuan dari penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh dana desa dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada 29 kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPKN), dengan metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan model yang dipilih yaitu *fixed effect models*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Azizah (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”. Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, IPM, PDRB, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan model yang dipilih yaitu *fixed effect models*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur, sedangkan variabel IPM dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

Panggabean & Matondang (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017”. Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010-2017, dengan metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah regresi data panel dengan PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak signifikan dan berpengaruh negatif, variabel IPM negatif signifikan, serta variabel pertumbuhan ekonomi positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat.

Wulansari et al., (2023) melakukan penelitian dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia”. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan menggunakan data sekunder dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model *fixed effect models*, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Khoirudin (2023) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2014-2022. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana produk domestik regional bruto, pengangguran, pendidikan, upah minimum provinsi, serta indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2014-2022, dengan metode regresi data panel dan model terbaik yang digunakan adalah *fixed effect models*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

Ariana (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tahun Pendidikan yang Diharapkan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, harapan lama sekolah, dan indeks pembangunan

manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dari tahun 2018-2022, dengan metode OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harapan lama sekolah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan selama periode penelitian.

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil temuan-temuan tersebut juga memperlihatkan adanya variasi hasil antar penelitian, yang memungkinkan dipengaruhi oleh perbedaan wilayah, periode analisa, serta pemilihan variabel yang digunakan. Perbedaan itulah yang menjadi dasar pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada 80 kabupaten yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa, diantaranya provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Variabel dependen yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Kemiskinan, dengan variabel independen yang akan dianalisis meliputi Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah, dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instrumen fiskal daerah dan kebijakan pembangunan memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dengan landasan penelitian-penelitian tersebut diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana masing-masing maupun secara keseluruhan variabel independen memberikan pengaruh dalam menurunkan tingkat penduduk miskin di Pulau Jawa, sekaligus menjelaskan inkonsistensi hasil yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kemiskinan

2.2.1.1. Definisi Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika suatu individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik yang bersifat pangan maupun non-pangan, melalui pendekatan pengukuran berbasis pengeluaran. Dalam hal ini, penduduk miskin didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan yang sudah ditetapkan. Pendekatan tersebut menekankan bahwa keterbatasan daya beli menjadi indikator utama dalam mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kemiskinan pula bisa dimaknai secara lebih luas sebagai kondisi deprivasi yang menyebabkan individu atau kelompok tidak mampu mengakses dan memenuhi hak dasarnya.

Sen (1999) mendefinisikan kemiskinan tidak hanya mengenai finansial belaka, yakni sebagai bentuk perampasan kapabilitas individu untuk hidup secara layak. Pendekatan kapabilitas (*capability approach*) yang ditawarkan menyoroti bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta keterbatasan individu adalah inti dari kemiskinan multidimensional. Kenaikan pendapatan finansial dinilai belum cukup untuk mengurai kemiskinan tanpa adanya jaminan atas hak dasar dan akses pembangunan bagi masyarakat. Kesimpulannya, strategi untuk menanggulangi kemiskinan harus terintegrasi dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu manusia, perluasan akses fasilitas publik, dan pemerataan kesempatan ekonomi agar setiap individu dapat berkembang secara optimal (Sen, 1999).

2.2.1.2. Teori Kemiskinan

Menurut Nurkse (1953), kemiskinan muncul akibat adanya *vicious circle of poverty* atau lingkaran setan kemiskinan, yaitu suatu keadaan dimana ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah akan menyebabkan kemampuan menabung dan berinvestasi menjadi terbatas. Kondisi tersebut kemudian akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas, sehingga pendapatan masyarakat tetap berada di tingkat yang rendah secara terus menerus. Dalam teori ini, keterbelakangan ekonomi suatu wilayah

dipengaruhi oleh keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan kurang meratanya akses infrastruktur yang memadai. Teori ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai kemiskinan, karena dana desa dan pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dengan cara membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Di lain sisi, meningkatnya nilai PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Marx (1867), kemiskinan merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalis yang menimbulkan ketimpangan dalam kepemilikan modal serta praktik eksploitasi pada tenaga kerja. Dalam pandangannya, kelompok yang menguasai modal cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar, sementara para pekerja hanya menerima upah dalam jumlah terbatas, sehingga disitulah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Dalam hal mengenai pembangunan daerah, teori ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan jika pembangunan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau daerah tertentu. Relevansi teori Karl Marx dengan penelitian ini terlihat pada variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah, karena ketika terjadi peningkatan nilai PDRB daerah belum tentu akan memberikan manfaat yang merata pada seluruh masyarakat. Oleh karenanya, disitulah dibutuhkan peran pemerintah melalui pengeluaran publik dan kebijakan fiskal daerah melalui dana desa untuk memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Chambers (1983), kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional, sehingga tidak hanya diukur dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup aspek ketidakmampuan, kerentanan sosial, keterasingan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya utama. Chambers menjelaskan bahwa kelompok masyarakat miskin umumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini, karena variabel dana desa, pengeluaran

pemerintah, dan harapan lama sekolah dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses masyarakat dalam mengakses fasilitas dasar dan pembangunan wilayah. Peningkatan kualitas pendidikan kesehatan, dan penciptaan lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

2.2.1.3. Ukuran Kemiskinan

Secara umum, pengukuran kemiskinan digunakan untuk mengidentifikasi kondisi individu maupun kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Tingkat kemiskinan dapat diukur melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan pendapatan, konsumsi, dan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan pengukuran kemiskinan berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Macam-macam kemiskinan diuraikan sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan keadaan ketika tingkat pendapatan masyarakat atau individu berada dibawah garis kemiskinan, sehingga individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Konsep tersebut yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur jumlah penduduk miskin di Indonesia.

2. Kemiskinan Relatif

3. Kemiskinan Struktural

4. Kemiskinan Kultural

5. Kemiskinan Multidimensional

2.2.2. Dana Desa

2.2.2.1. Definisi Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018), alokasi dana desa dari pemerintah kepada daerah maupun desa merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui konsep itulah, pemerintah daerah dan

pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya keuangan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan pembangunan mampu berlangsung dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Dana desa dianggap sebagai instrumen krusial dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Relevansi teori tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada peran dana desa yang diduga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat desa pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa.

Menurut Nurcholis (2011), Dana desa merupakan wujud dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi desa yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola pembangunan serta pelayanan masyarakat secara mandiri. Dana desa tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah pedesaan. Pengelolaan dana desa yang dilakukan secara efektif dapat mendorong peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pendapatan masyarakat desa. Pandangan tersebut relevan dengan penelitian ini karena efektivitas pengelolaan dana desa berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan pembangunan ekonomi daerah.

2.2.2.2. *Sumber Dana Desa*

Menurut DJPb (2021), dana desa merupakan alokasi transfer dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa melalui APBD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, dana desa memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan karena peningkatan kualitas pembangunan desa berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan aktivitas produktif masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa.

2.2.2.3. Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga desa, serta mengurangi tingkat kemiskinan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Upaya tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana desa, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dana desa tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh (DJPb, 2021).

2.2.2.4. Hubungan antara Dana Desa dengan Kemiskinan

Menurut Sumodiningrat (1999), kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pengurangan kemiskinan, karena masyarakat diberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan taraf kesejahteraan melalui dukungan pendanaan dari desa. Sumodiningrat menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar kelompok miskin mampu keluar dari kondisi keterbelakangan ekonomi. Dalam lingkup dana desa, alokasi dana yang diturunkan dari pemerintah pusat kepada desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja yang akhirnya akan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Teori tersebut relevan dengan penelitian ini karena dana desa diperkirakan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan pada kabupaten di Pulau Jawa melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat desa.

2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.3.1. Teori Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sukirno (2016), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, umumnya dalam kurun

waktu satu tahun. PDRB digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat perkembangan aktivitas ekonomi serta laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sukirno menyatakan bahwa peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa pada suatu wilayah mencerminkan semakin berkembangnya perekonomian daerah tersebut, karena pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari peningkatan nilai PDRB dapat mendorong kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut akan memperbesar kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga tingkat kemiskinan berpotensi mengalami penurunan.

Meskipun demikian, Sukirno menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PDRB tidak selalu secara langsung mampu menekan tingkat kemiskinan apabila hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Dalam penelitian ini, PDRB memiliki peran krusial sebagai ukuran kemampuan ekonomi kabupaten di Pulau Jawa dalam menghasilkan pendapatan masyarakat, memperluas kegiatan ekonomi, dan mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Menurut Arsyad (2020), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan akumulasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan usaha dalam suatu wilayah, atau keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh berbagai sektor ekonomi dalam periode waktu tertentu. Arsyad menegaskan bahwa PDRB menjadi salah satu indikator utama dalam kajian pembangunan ekonomi daerah karena mampu mencerminkan tingkat produktivitas serta karakteristik struktur ekonomi suatu wilayah. Arsyad berpendapat bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan peran pemerintah daerah bersama masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan peluang kerja baru. Peningkatan output regional dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada perbaikan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan (Arsyad, 2020). Oleh karenanya, wilayah dengan nilai PDRB yang lebih tinggi umumnya menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif lebih maju dibandingkan wilayah dengan tingkat PDRB

yang rendah. Dalam lingkup penelitian ini, PDRB digunakan untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah serta menganalisis keterkaitannya dengan tingkat kemiskinan pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa.

Menurut Badan Pusat Statistik (2025), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. dalam pengukurannya, PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menggambarkan kapasitas ekonomi serta struktur perekonomian suatu daerah, sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi secara riil dari waktu ke waktu tanpa dipengaruhi perubahan harga. Konsep ini relevan dengan. Penelitian ini karena variabel PDRB dimanfaatkan untuk menganalisis pengaruh kondisi dan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan.

Menurut (Todaro & Smith, 2020), tingkat output atau pendapatan regional mencerminkan kapasitas perekonomian suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa. Perkembangan output daerah menjadi salah satu tolak ukur utama dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan peningkatan aktivitas produksi, perluasan lapangan pekerjaan, serta perbaikan pendapatan masyarakat. Kedua ahli tersebut juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui peningkatan PDRB dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Oleh karenanya, PDRB tidak hanya berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konsep penelitian ini, peningkatan PDRB daerah diharapkan mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui bertambahnya aktivitas ekonomi daerah dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

2.2.3.2. Alat Ukur Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. melalui PDRB, dapat diketahui tingkat kemampuan wilayah dalam menciptakan nilai tambah dari kegiatan produksi barang dan jasa, sekaligus menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain berfungsi untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi, PDRB juga digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi regional, tingkat pendapatan masyarakat, serta perubahan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu, di Indonesia, proses perhitungan PDRB dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan berbagai pendekatan perhitungan dan indikator ekonomi yang telah ditetapkan secara nasional.

Menurut Badan Pusat Statistik, pengukuran PDRB dapat dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi menilai PDRB berdasarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan setiap sektor ekonomi, pendekatan pendapatan menghitung balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi, sedangkan pendekatan pengeluaran melihat total pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah. Badan Pusat Statistik menjelaskan secara lebih detail mengenai ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan ini merupakan metode penghitungan PDRB yang dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. nilai tambah tersebut diperoleh dari selisih antara nilai output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi, seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan jasa terhadap perekonomian daerah (BPS, 2025).

Secara sistematis, pendekatan produksi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB = \Sigma(Output - Input)$$

2. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan merupakan metode perhitungan PDRB yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Pendapatan tersebut mencakup balas jasa tenaga kerja dalam bentuk upah, pendapatan dari kepemilikan aset berupa sewa, imbal hasil modal dalam bentuk bunga, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Secara sistematis, pendekatan pendapatan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$PDRB = \text{Upah} + \text{Sewa} + \text{Bunga} + \text{Laba}$$

Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai distribusi hasil kegiatan ekonomi kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi.

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran merupakan metode perhitungan PDRB yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran atas barang dan jasa akhir yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. komponen pengeluaran tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih antara ekspor dan impor (*ekspor neto*). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan besarnya permintaan agregat dalam perekonomian daerah.

Secara sistematis, pendekatan pengeluaran dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$PDRB = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

C : Konsumsi Rumah Tangga

I : Investasi

G : Pengeluaran Pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

2.2.3.3. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan

Berdasarkan berbagai teori yang sudah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB memiliki keterkaitan yang kuat dengan

tingkat kemiskinan. Peningkatan nilai PDRB mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi dan bertambahnya kapasitas pendapatan daerah yang berpotensi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, variabel PDRB digunakan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Secara teoritis, daerah dengan nilai PDRB yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena adanya peningkatan kesempatan kerja, kenaikan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan pelayanan publik.

2.2.4. Pengeluaran Pemerintah

2.2.4.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Wagner (1892), perkembangan perekonomian suatu negara atau daerah akan diikuti oleh meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pandangan ini dikenal sebagai *Wagner's Law*, yang menjelaskan bahwa adanya kemajuan ekonomi akan mendorong bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi dan tuntutan terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah dituntut harus mampu memperluas fungsi dan pengeluarannya guna mendukung dalam proses pembangunan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori Wagner menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung pembangunan ekonomi, penyediaan fasilitas publik, serta pelaksanaan program sosial yang diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada kabupaten di Pulau Jawa.

Menurut Keynes (1962), belanja pemerintah memiliki peranan strategis dalam memengaruhi kondisi perekonomian, terutama dalam meningkatkan permintaan agregat dan dalam mendorong aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Keynes, ketika sebuah perekonomian mengalami penurunan atau ketidakstabilan, pemerintah diperlukan untuk melakukan intervensi melalui peningkatan pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, dan pelaksanaan program sosial, yang dilakukan guna merangsang atau meningkatkan daya beli masyarakat serta

untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Keynes juga menegaskan bahwa campur tangan pemerintah sangat diperlukan guna menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan melalui penurunan tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini, teori keynes relevan karena pengeluaran pemerintah daerah dapat menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas layanan publik, dan menekan tingkat kemiskinan pada kabupaten di Pulau Jawa.

Menurut Musgrave (1989), pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi besar dalam pelaksanaan kebijakan fiskal melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum, infrastruktur serta berbagai layanan publik lainnya. Fungsi distribusi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan untuk fungsi stabilisasi diarahkan guna menjaga kestabilan perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Belanja pemerintah menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menekan tingkat kemiskinan melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang tepat (Musgrave, 1989). Teori ini memiliki relevansi dengan penelitian karena pengeluaran pemerintah daerah dapat dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program sosial yang diharapkan memiliki kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Menurut Sukirno (2016), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Belanja pemerintah juga dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberian subsidi, serta pengembangan pelayanan publik yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan belanja pemerintah mampu menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Sukirno, 2016). Dalam lingkup penelitian ini, teori tersebut mendukung adanya keterkaitan

antara pengeluaran pemerintah daerah dengan tingkat kemiskinan pada kabupaten di Pulau Jawa.

2.2.4.2. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama dalam kebijakan fiskal daerah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan sebelumnya diatas, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan melalui fungsi pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan penyedia pelayanan publik bagi masyarakat. Melalui alokasi anggaran publik, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas dan layanan pendukung yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial. Selain itu, belanja pemerintah juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, kemiskinan menggambarkan kondisi ketika masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar akibat rendahnya tingkat pendapatan, terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu instrumen utama dalam mengurangi berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kesempatan ekonomi.

Secara teoritis, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan bersifat negatif, yang berarti peningkatan belanja pemerintah yang dilakukan secara efektif dan tepat sasaran cenderung mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Alokasi anggaran yang ditujukan pada sektor-sektor produktif dan pelayanan publik mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Dihubungkan dengan penelitian ini, pengeluaran pemerintah daerah pada kabupaten di Pulau Jawa diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan pembangunan ekonomi dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.2.5. Harapan Lama Sekolah (HLS)

2.2.5.1. Teori Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan peluang penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal di masa mendatang. Menurut BPS (2026), Harapan Lama Sekolah mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap pendidikan serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi angka Harapan Lama Sekolah, semakin besar peluang masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Menurut Schultz (1961), pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan merupakan bentuk investasi yang dilakukan pada modal manusia (*human capital investment*) guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan pendapatan masyarakat di masa yang akan datang. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu memperoleh kesempatan kerja yang lebih layak dan pendapatan yang lebih tinggi. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencerminkan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk menjalani pendidikan dalam waktu yang lebih lama (BPS, 2026). Semakin tinggi nilai HLS, maka akan semakin tinggi pula peluang seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, sehingga kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Menurut Sukirno (2014), pembangunan ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga didasarkan pada tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sukirno menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan, karena masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik akan cenderung lebih produktif dalam menjalankan aktivitas

ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus juga membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam lingkup penelitian ini, teori tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan kemiskinan. Peningkatan HLS akan mencerminkan membaiknya kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan mendukung penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Menurut Todaro & Smith (2020), pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa meningkatnya pendapatan nasional, tetapi juga dari seberapa berhasilnya dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Teori tersebut menekankan bahwa proses pembangunan ekonomi harus bisa menekan tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memperkecil ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakatnya. Dalam perspektif tersebut, Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah, karena HLS sebagai komponen IPM ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif. Dalam penelitian ini, HLS digunakan sebagai variabel yang di duga akan memengaruhi tingkat kemiskinan, karena peningkatan kualitas manusia dapat mendorong produktivitas, memperbesar peluang dalam memperoleh pendapatan yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sen (1999), pembangunan manusia berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan kebebasan individu dalam menentukan serta menjalani kehidupan yang dianggap bernilai dan dianggap layak. Sen menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dari terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai peluang untuk mencapai kehidupan yang layak. Melalui pendekatan *Capability Approach*, pembangunan dipandang harus berorientasi pada peningkatan kualitas manusia agar individu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Pemikiran tersebut yang kemudian menjadi salah satu landasan utama dalam pembentukan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) (Sen, 1999). Dalam penelitian ini, teori Sen menunjukkan bahwa peningkatan IPM terutama

pada indikator pendidikan (HLS) akan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan, karena masyarakat dengan kualitas pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi serta peluang ekonomi yang lebih luas.

2.2.5.2. Hubungan antara Harapan Lama Sekolah dengan Kemiskinan

Berdasarkan teori dan pandangan para ahli, Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan adanya keterkaitan dengan tingkat kemiskinan, dikarenakan HLS menggambarkan kualitas masyarakat melalui aspek pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan mendorong kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitasnya, yang kemudian akan membuatnya memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih layak. Kondisi itulah yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

Secara teoritis, hubungan antara HLS dengan kemiskinan bersifat negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi angka harapan lama sekolah di suatu daerah, maka kecenderungan terhadap tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Peningkatan kualitas pendidikan dan lamanya pendidikan akan memperbesar peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik, sehingga mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah.

2.3. Hipotesis Penelitian

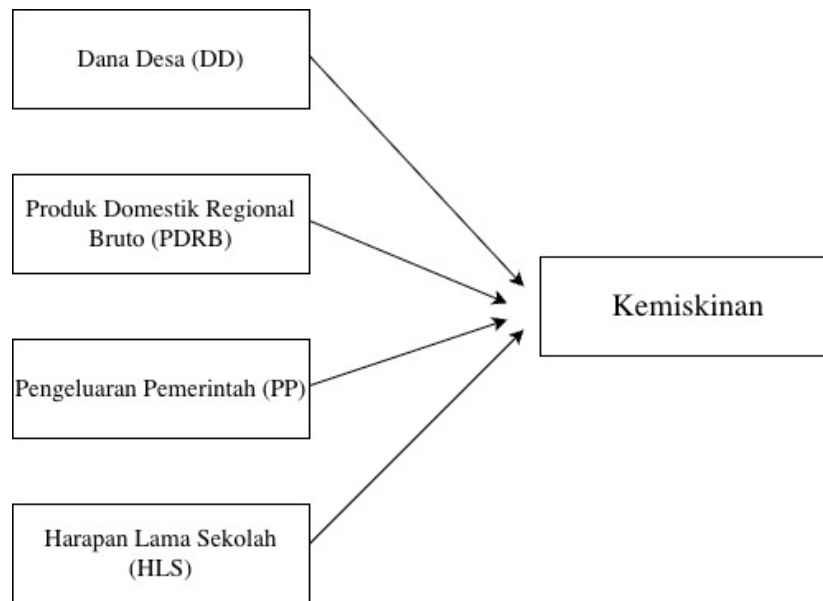
Dengan pertimbangan dari penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan diperkuat oleh landasan teori yang digunakan, hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga variabel Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa
2. Diduga variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa
3. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa
4. Diduga variabel Harapan Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa

2.4. Kerangka Penelitian

Menurut Todaro & Smith (2020), pembangunan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan output saja, tetapi juga mencakup bagaimana kemampuan suatu wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Keberhasilan pembangunan perlu diukur dari sejauh mana pertumbuhan itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh dan bersifat multidimensional (Todaro & Smith, 2020). Dalam perspektif ini, indikator seperti pendapatan daerah, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan fiskal pemerintah memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Konsep tersebut yang kemudian relevan dengan penelitian ini, bahwa kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan ada keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan manusia, dan kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, variabel Dana Desa dan Pengeluaran Pemerintah akan mencerminkan kebijakan fiskal, PDRB sebagai penggambaran kinerja pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan Harapan Lama Sekolah menunjukkan bagaimana kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan kemiskinan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh empat variabel independen, yaitu Dana Desa, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Harapan Lama Sekolah. Secara konseptual, hubungan antara variabel independen dan dependen akan menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan dapat dicapai melalui sinergi yang saling terkait dan efektivitas kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Berdasarkan landasan pemikiran yang sudah dijelaskan, dapat di konseptualisasikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder, yang didapatkan dengan teknik mengakses, mengunduh, dan kemudian mengolah data dari sumber-sumber lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup persentase penduduk miskin, dana desa, produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah, dan harapan lama sekolah. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu dengan menggabungkan data *time series* dari tahun 2018 hingga tahun 2024 dan data *cross section* dari 80 kabupaten yang ada di Pulau Jawa khususnya provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Tabel 3. 1 Deskripsi Variabel

Variabel	Simbol	Periode	Satuan Ukuran	Sumber Data
Persentase Kemiskinan	PK	Tahunan	Persentase	BPS
Dana Desa	LOG(DD)	Tahunan	Ribu Rupiah	DJPk
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	Tahunan	Juta Rupiah	BPS
Pengeluaran Pemerintah	PP	Tahunan	Ribu Rupiah	BPS
Harapan Lama Sekolah	HLS	Tahunan	Persentase	BPS

3.2. Definisi Variabel Operasional

Definisi variabel operasional merupakan penjelasan secara spesifik dan rinci dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, untuk mempertegas cakupan tiap

variabelnya agar pengukurannya bersifat empiris. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen sebagai berikut:

3.2.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen). Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel terikat, karena perubahan yang terjadi pada variabel dependen di asumsikan terjadi karena adanya perubahan dari variabel independen atau variabel bebas dalam model penelitian.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin dari 80 kabupaten di beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa seperti, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, dalam periode waktu tahun 2018 hingga 2024. Nilai kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran persentase.

3.2.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau yang disebut juga dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi ataupun yang menjadi penyebab dari perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Variabel ini digunakan untuk menjelaskan perubahan atau pengaruh dalam suatu model penelitian, serta digunakan untuk menerangkan variasi terhadap variabel terikat dalam model. Variabel independen digunakan untuk melihat bagaimana hubungan atau pengaruhnya secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen yang digunakan. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan meliputi Dana Desa (X1), Produk Domestik Regional Bruto (X2), Pengeluaran Pemerintah (X3), dan Harapan Lama Sekolah (X4) yang penulis duga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 4 provinsi yang ada di Pulau Jawa selama periode tahun 2018-2024.

3.2.2.1. Dana Desa

Dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan kemudian didistribusikan oleh pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan desa, yang didasari oleh undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa (DJPb, 2021).

Menurut DJPb (2021), dana desa diperuntukkan guna membiayai pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dari kacamata ekonomi, dana desa berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Nilai dana desa dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dalam ribu rupiah.

3.2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah output atau nilai tambah barang dan jasa akhir yang di produksi atau yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam periode waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2024). Secara umum, PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga konstan yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar tertentu, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Data variabel PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku, karena didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin melihat pengaruh kondisi ekonomi daerah secara aktual yang berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan selama periode waktu penelitian. Nilai PDRB dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dalam juta rupiah.

3.2.2.3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan seluruh alokasi anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dan perekonomian daerah. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengeluaran tersebut sudah terangkum dalam APBD yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Dan digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nilai pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dalam ribu rupiah.

3.2.2.4. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya tahun yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat pada usia tertentu di masa yang akan datang. HLS diasumsikan mampu mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan.

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dalam proses analisisnya. Metode yang diterapkan berfokus pada analisis kausalitas untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti. Dalam hal ini, variabel yang digunakan dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen, sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Struktur data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *balanced panel*, yaitu jumlah observasi pada setiap unit *cross section* dan periode *time series* adalah sama.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10% untuk menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis. Analisis statistik dilakukan melalui uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. Seluruh proses pengolahan dan analisis data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak EViews 12.

Dalam analisis hubungan antara variabel dependen dan independen menggunakan regresi data panel, pemilihan model tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan. Widarjono (2018) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam pemodelan data panel yaitu sebagai berikut:

3.3.1. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model atau *Ordinary Least Squares (OLS)* merupakan salah satu pendekatan paling dasar dalam analisis data panel. Model ini berasumsi bahwa tidak terdapat perbedaan karakteristik baik antar unit individu (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*), sehingga seluruh observasi diperlakukan homogen atau sama.

Dalam pendekatan ini, data cross section dan time series digabungkan menjadi satu tanpa mempertimbangkan efek individual maupun perbedaan periode waktu, dengan nilai intercept maupun koefisien slope diasumsikan konstan untuk seluruh unit observasi yang dianalisis. Bentuk persamaan *Common Effect Model* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : persentase penduduk miskin

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi X_1, X_2, X_3, X_4

$\ln X_1$: log dari Dana Desa

$\ln X_2$: log dari PDRB

$\ln X_3$: log dari Pengeluaran Pemerintah

X_4 : Harapan Lama Sekolah

i : Objek yang digunakan yaitu 80 kabupaten

t : periode waktu yang digunakan yaitu 7 periode (2018-2024)

e_{it} : error term atau residual

3.3.2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Estimasi dengan *Fixed Effect Model (FEM)* merupakan suatu pendekatan yang mengasumsikan adanya perbedaan nilai intersep antar unit observasi dengan cara memasukkan variabel dummy ke dalam model regresi. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap variasi intersep yang spesifik pada setiap individu, sementara nilai tersebut dianggap konstan sepanjang periode waktu pengamatan. Disisi lain, koefisien regresi atau slope diasumsikan tetap sama baik antar individu maupun antar waktu. Metode ini memanfaatkan variabel dummy atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Bentuk persamaan *Fixed Effect Model* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1it} + \dots + \beta_{12} D_{6it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : persentase penduduk miskin

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi X_1, X_2, X_3, X_4

$\ln X_1$: log dari Dana Desa

$\ln X_2$: log dari PDRB

$\ln X_3$: log dari Pengeluaran Pemerintah

X_4 : Harapan Lama Sekolah

$\beta_5, \beta_6, \dots, \beta_n$: Intersep dummy setiap kabupaten

$D_1, D_2, \dots, D_{12}$: Dummy untuk setiap kabupaten

i : Objek yang digunakan yaitu 80 kabupaten

t : periode waktu yang digunakan yaitu 7 periode (2018-2024)

e_{it} : error term atau residual

3.3.3. *Random Effect Model (REM)*

Metode *Random Effect Model* merupakan salah satu teknik estimasi dalam data panel yang memperlakukan perbedaan antar unit dan antar individu sebagai komponen acak yang tercermin dalam error term. Dalam pendekatan ini, diasumsikan bahwa komponen gangguan dapat memiliki korelasi baik antar periode maupun antar individu. Metode ini umumnya dilakukan dengan menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) karena metode ini lebih tepat dalam menangani adanya kemungkinan korelasi dalam komponen error. Secara umum, bentuk persamaan *Random Effect Model* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1it} + \dots + \beta_{12} D_{6it} + (e_{it} + u_i)$$

Keterangan:

Y_{it} : persentase penduduk miskin

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi X_1, X_2, X_3, X_4

$\ln X_1$: log dari Dana Desa

$\ln X_2$: log dari PDRB

$\ln X_3$: log dari Pengeluaran Pemerintah

X_4 : Harapan Lama Sekolah

i : Objek yang digunakan yaitu 80 kabupaten

t : periode waktu yang digunakan yaitu 7 periode (2018-2024)

e_{it} : error term atau residual

u_i : variabel gangguan berbeda antar individu tapi sama antar waktu

3.4. Pemilihan Model

Lebih lanjut Widarjono (2018), mengemukakan bahwa penentuan model terbaik dalam analisis data panel umumnya melalui tiga pengujian utama, yaitu Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier, dan Uji Hausman. Masing-masing pengujian tersebut memiliki tujuan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam membantu proses pemilihan model yang paling sesuai dengan karakteristik data yang akan dianalisis. Berikut adalah penjelasannya:

3.4.1. Uji F (Chow Test)

Uji Chow (F-test) merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan pilihan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam analisis data panel. Pengujian ini berfungsi untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan

karakteristik antar unit individu yang signifikan dalam model yang diestimasi. Dengan hipotesis yang mendasari Uji F sebagai berikut:

H0: *common effect model* lebih baik dari *fixed effect model*

H1: *fixed effect model* lebih baik dari *common effect model*

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Chow dilakukan dengan membandingkan nilai statistik F hitung dengan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, maka hipotesis nol (H0) ditolak, yang mengindikasikan bahwa *fixed effect model* merupakan model yang lebih sesuai digunakan. sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 gagal ditolak sehingga *common effect model* dianggap lebih baik. Selain itu, keputusan juga dapat didasarkan pada nilai probabilitas (p-value). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka H0 ditolak. Namun, apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H0 gagal ditolak sehingga *common effect model* lebih sesuai digunakan dalam analisis.

3.4.2. Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Uji Lagrange Multiplier (LM Test) yang dikembangkan oleh Breusch dan Pagan digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai dengan membandingkan *random effect model* dan *common effect model* dalam analisis data panel. Dalam prosedurnya, uji Breusch-Pagan memanfaatkan nilai residual yang diperoleh dari estimasi OLS sebagai dasar perhitungan untuk menguji signifikansi efek acak. Dengan hipotesis yang mendasari LM test sebagai berikut:

H0: *common effect model* lebih baik dari *random effect model*

H1: *random effect model* lebih baik dari *common effect model*

Uji Lagrange Multiplier didasarkan kepada distribusi chi-square dengan derajat kebebasan yang sudah ditentukan oleh jumlah variabel independen dalam model. Ketika nilai LM test yang diperoleh lebih besar daripada nilai kritis chi-square, maka hipotesis nol (H0) ditolak, yang mengindikasikan bahwa *random effect model* lebih sesuai untuk digunakan. sebaliknya, jika nilai LM test lebih kecil dari nilai kritis chi-square, maka H0 tidak dapat ditolak sehingga *common effect model* dianggap lebih baik. Selain itu, keputusan juga dapat didasarkan pada nilai probabilitas (p-value). jika nilai probabilitas

lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka H_0 ditolak. Namun, apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H_0 gagal ditolak sehingga *common effect model* lebih baik digunakan dalam analisis.

3.4.3. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai dengan membandingkan *random effect model* dan *fixed effect model*. Dalam pendekatan *random effect*, diasumsikan bahwa terdapat kemungkinan korelasi antara komponen kesalahan(error term) dan variabel independen, serta estimasi dilakukan dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Sementara itu, pada *fixed effect model* diasumsikan tidak terdapat korelasi antara *error term* dan variabel independen, dengan estimasi yang umumnya menggunakan metode OLS. Dengan hipotesis yang mendasari Uji Hausman sebagai berikut:

H_0 : *random effect model* lebih baik dari *fixed effect model*

H_1 : *fixed effect model* lebih baik dari *random effect model*

Keputusan Uji Hausman didasarkan pada perbandingan nilai statistik chi-square dengan nilai kritisnya pada derajat kebebasan sesuai jumlah variabel independen. Jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai kritis, maka H_0 ditolak sehingga *fixed effect model* yang digunakan. sebaliknya, jika nilai chi-square hitung lebih kecil daripada nilai kritis, maka H_0 gagal ditolak, sehingga *random effect model* lebih baik digunakan dalam analisis.

3.5. Pengujian Statistik

Uji statistik berfungsi untuk menarik kesimpulan hasil penelitian sekaligus mengevaluasi kemampuan model regresi dalam menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh. Dalam analisis ekonometrika pengujian ini memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa hubungan antar variabel yang diperoleh dari data sampel tidak bersifat kebetulan, melainkan didukung oleh signifikansi statistik yang memadai.

Menurut Widarjono (2018), pengujian statistik dalam regresi pada umumnya mencakup tiga komponen utama, yaitu sebagai berikut:

3.5.1. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R-Squared yang semakin besar berarti menunjukkan bahwa proporsi perubahan variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model juga semakin tinggi, sehingga mengindikasikan tingkat kesesuaian model yang semakin terbaik. Untuk memperoleh nilai koefisien determinasi rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST}$$

Keterangan:

R^2 : koefisien regresi

SSR : Sum of Square Residual

SST : Total Sum of Squares

3.5.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Melalui uji ini dapat diketahui apakah seluruh variabel independen pada model secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Untuk memperoleh nilai F hitung rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$F = \frac{ESS/(k - 1)}{SSR/(n - k)}$$

Keterangan:

ESS : Explained Sum of Squares

SSR : Sum of Squares Residual

n : Jumlah observasi

k : Jumlah parameter estimasi

Uji simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F tabel sebagai dasar pengambilan keputusan. Nilai F tabel ditentukan melalui derajat kebebasan yang terdiri dari denominator dan numerator. Derajat kebebasan tersebut dihitung dengan rumus:

$$df_{denominator} = n - k$$

$$df_{numerator} = k - 1$$

Selanjutnya, pengujian diawali dengan perumusan hipotesis. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, yang berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, yang berarti, terdapat pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam pengambilan keputusan, apabila nilai F hitung lebih kecil dibandingkan F kritis maka H_0 gagal ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F kritis, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai pengaruh setiap variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen dengan mengacu pada tabel distribusi t. Dengan uji ini, akan dapat diidentifikasi variabel independen mana saja yang memiliki pengaruh signifikan secara individual pada variabel dependen yang digunakan. Nilai t-kritis ditentukan dengan terlebih dahulu menghitung derajat kebebasan (degree of freedom) menggunakan rumus $df = n - k$, kemudian merujuk pada tabel distribusi t sesuai tingkat signifikansi yang digunakan. dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang diterapkan adalah 1%, 5% dan 10%.

Pengambilan keputusan dalam uji parsial dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-kritis. Apabila nilai t-statistik lebih besar daripada t-kritis, maka hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai t-statistik lebih kecil dari t-kritis, maka pengaruh

variabel tersebut dinyatakan tidak signifikan secara statistik. Selain itu, keputusan juga dapat didasarkan pada nilai probabilitas (p-value). jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka H_0 ditolak. Namun, apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H_0 gagal ditolak sehingga menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil deskripsi data statistik pada tabel 4.1 total observasi pada setiap variabel baik dependen maupun independen adalah sejumlah 80. Pada variabel Kemiskinan, nilai tertinggi sebesar 23.76 persen ditunjukkan oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2021, sedangkan nilai terendahnya sebesar 4.01 persen ditunjukkan oleh Kabupaten Bekasi pada tahun 2019. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada variabel Kemiskinan dari tahun 2018-2024 adalah sebesar 10.98 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 3.43 dan nilai median sebesar 10.41.

Tabel 4. 1 Deskripsi Data Statistik

Variabel	N	Mean	Median	Maximum	Minimum	Standar Deviasi
Kemiskinan (persentase)	560	10.98	10.41	23.76	4.01	3.43
Dana Desa (ribu rupiah)	560	280.000	264.000	599.108	77.427	90.019
Produk Domestik Bruto (juta rupiah)	560	60.547	38.961	421.324	10.352	61.113
Pengeluaran Pemerintah (ribu rupiah)	560	2.959	2.610	11.114	1.161	1.262
Harapan Lama Sekolah (persentase)	560	12.75	12.67	15.22	11.42	0.65

Sumber: Olah Data Eviews 12

Pada variabel Dana Desa, dengan nilai tertinggi sebesar 599.108 ribu rupiah ditunjukkan oleh Kabupaten Bogor pada tahun 2024, sedangkan nilai terendahnya sebesar 77.427 ribu rupiah ditunjukkan oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018.

Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada variabel Dana Desa dari tahun 2018-2024 adalah sebesar 280.000 ribu rupiah dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 90.019 dan nilai median sebesar 264.000.

Pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nilai tertinggi sebesar 421.324 juta rupiah ditunjukkan oleh Kabupaten Bekasi pada tahun 2024, sedangkan nilai terendahnya sebesar 10.352 juta rupiah ditunjukkan oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada variabel PDRB dari tahun 2018-2024 adalah sebesar 60.547 juta rupiah dengan nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 61.113 dan nilai median sebesar 38.961.

Pada variabel Pengeluaran Pemerintah nilai tertinggi sebesar 11.164 ribu rupiah ditunjukkan oleh Kabupaten Bogor pada tahun 2024, sedangkan nilai terendahnya sebesar 1.161 ribu rupiah ditunjukkan oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada variabel Pengeluaran Pemerintah dari tahun 2018-2024 adalah sebesar 2.959 ribu rupiah dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 1.262 dan nilai median sebesar 2.610.

Pada variabel Harapan Lama Sekolah nilai tertinggi sebesar 15.22 ditunjukkan oleh Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024, sedangkan nilai terendahnya sebesar 11.42 ditunjukkan oleh Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada variabel Harapan Lama Sekolah dari tahun 2018-2024 adalah sebesar 12.75 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0.65 dan nilai median sebesar 12.67.

4.2 Pengujian Model Regresi

4.2.1 *Common Effect Model (CEM)*

Pada tabel 4.2 tertera hasil regresi *common effect model* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-27.94938	7.591420	-3.681706	0.0003
LOG(DD)	5.040409	0.472135	10.67578	0.0000
LOG(PDRB)	-1.566555	0.277339	-5.648527	0.0000
LOG(PP)	-4.178590	0.696179	-6.002175	0.0000
HLS	-0.705897	0.176724	-3.994355	0.0001
COVID_19	0.590749	0.326277	1.810576	0.0707
<hr/>				
R-squared	0.392616			
Adjusted R-squared	0.387134			
F-statistic	71.62154			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olab Data Eviews 12

4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Pada tabel 4.3 tertera hasil regresi *fixed effect model* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.99175	4.114831	3.400322	0.0007
LOG(DD)	1.065375	0.263913	4.036841	0.0001
LOG(PDRB)	-1.375574	0.242364	-5.675657	0.0000
LOG(PP)	-0.398637	0.198676	-2.006467	0.0454
HLS	-0.462143	0.182430	-2.533259	0.0116
COVID_19	0.843932	0.054455	15.49774	0.0000
<hr/>				
R-squared	0.986904			
Adjusted R-squared	0.984588			
F-statistic	426.1276			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olab Data Eviews 12

4.2.3 Random Effect Model (REM)

Pada tabel 4.4 tertera hasil regresi *random effect model* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Regresi Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.64547	4.022244	2.895267	0.0039
LOG(DD)	1.294504	0.254474	5.086989	0.0000
LOG(PDRB)	-1.566481	0.216281	-7.242817	0.0000
LOG(PP)	-0.438360	0.197781	-2.216395	0.0271
HLS	-0.441430	0.164074	-2.690436	0.0074
COVID_19	0.826883	0.054003	15.31190	0.0000
R-squared	0.467982			
Adjusted R-squared	0.463181			
S.E. of regression	0.431651			
F-statistic	97.46371			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olah Data Eviews 12

4.3 Uji Pemilihan Model

4.3.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model yang terbaik dengan membandingkan antara *common effect model* dengan *fixed effect model*. Hipotesis uji chow ditulis sebagai berikut:

H0: *common effect model* lebih baik dari *fixed effect model*

H1: *fixed effect model* lebih baik dari *common effect model*

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	272.843825	(79,475)	0.0000
Cross-section Chi-square	2148.624968	79	0.0000

Sumber: Olab Data Eviews 12

Berdasarkan hasil uji chow yang tercermin dalam tabel 4.5 didapatkan nilai probabilitas chi-square $0.0000 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) sehingga menolak H_0 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang terbaik adalah *fixed effect model*.

4.3.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk menentukan model yang terbaik dengan membandingkan antara *random effect model* dengan *common effect model*. Hipotesis uji LM ditulis sebagai berikut:

H_0 : *common effect model* lebih baik dari *random effect model*

H_1 : *random effect model* lebih baik dari *common effect model*

Tabel 4. 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1512.910 (0.0000)	1.467417 (0.2258)	1514.377 (0.0000)

Sumber: Olab Data Eviews 12

Berdasarkan hasil uji *lagrange multiplier* yang tercermin dalam tabel 4.6 didapatkan nilai probabilitas $0.0000 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) sehingga menolak H_0 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang terbaik adalah *random effect model*.

4.3.3 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang terbaik dengan membandingkan antara *random effect model* dengan *fixed effect model*. Hipotesis uji Hausman ditulis sebagai berikut:

H0: *random effect model* lebih baik dari *fixed effect model*

H1: *fixed effect model* lebih baik dari *random effect model*

Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	5	1.0000

Sumber: Olah Data Eviews 12

Berdasarkan hasil uji hausman yang tercermin dalam tabel 4.7 didapatkan nilai probabilitas $1.0000 > 0.1$ ($\alpha = 10\%$) sehingga gagal menolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang terbaik dan dipilih dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

4.4 Analisis Hasil Regresi

4.4.1. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dalam sebuah penelitian dapat dijelaskan oleh model. Berdasarkan hasil regresi *random effect model* didapatkan nilai R-Squared sebesar 0.4679. Artinya bahwa variabel dana desa, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan harapan lama sekolah mampu menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 46.79%. Sedangkan sisanya sebesar 53.21% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel

dependen. Berdasarkan hasil terbaik estimasi *random effect model* pada tabel 4.4 didapatkan nilai f-statistik sebesar 97.46371 dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) artinya variabel independen dana desa, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan harapan lama sekolah secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan.

4.4.3. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Estimasi *random effect model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.64547	4.022244	2.895267	0.0039
LOG(DD)	1.294504	0.254474	5.086989	0.0000
LOG(PDRB)	-1.566481	0.216281	-7.242817	0.0000
LOG(PP)	-0.438360	0.197781	-2.216395	0.0271
HLS	-0.441430	0.164074	-2.690436	0.0074
COVID_19	0.826883	0.054003	15.31190	0.0000
Weighted Statistics				
Root MSE	0.429333	R-squared	0.467982	
Mean dependent var	0.658540	Adjusted R-squared	0.463181	
S.D. dependent var	0.589141	S.E. of regression	0.431651	
Sum squared resid	103.2229	F-statistic	97.46371	
Durbin-Watson stat	1.432993	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.292658	Mean dependent var	10.98793	
Sum squared resid	4673.628	Durbin-Watson stat	0.031649	

Sumber: Olah Data Eviews 12

Berdasarkan hasil estimasi *random effect model* yang dicerminkan dalam tabel 4.8 pada variabel Dana Desa didapatkan nilai koefisien 1.2945 dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) artinya variabel Dana Desa berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Pada variabel Produk Domestik Bruto (PDRB) didapatkan nilai koefisien sebesar -1.5664 dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) artinya variabel PDRB berpengaruh secara signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Pada variabel Pengeluaran Pemerintah didapatkan nilai koefisien sebesar -0.4383 dengan nilai probabilitas $0.0271 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$) artinya variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Pada variabel Harapan Lama Sekolah didapatkan nilai koefisien sebesar -0.4414 dengan nilai probabilitas $0.0074 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) artinya variabel harapan lama sekolah berpengaruh secara signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

4.5 Interpretasi Hasil

4.5.1 Hubungan Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi *random effect model* pada tabel 4.8, pada variabel Dana Desa didapatkan nilai koefisien sebesar 1.2945 dengan nilai probabilitas 0.0000 lebih kecil dari alpha 1% yang menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan dengan arah yang positif. Artinya, saat terjadi kenaikan Dana Desa sebesar 1 satuan akan diikuti dengan meningkatnya Kemiskinan di 80 kabupaten se Pulau Jawa sebesar 129.45 persen pada periode penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti et al. (2025) yang menunjukkan bahwa Dana Desa signifikan terhadap kemiskinan, namun memiliki pengaruh yang positif, yang memperlihatkan bahwa peningkatan

Dana Desa belum secara langsung memberikan dampak untuk menurunkan jumlah kemiskinan jika pengelolaannya belum sepenuhnya optimal.

Menurut Todaro & Smith (2020) Pembangunan ekonomi bukan hanya fokus di pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada kualitas hidup dan pembangunan wilayah pedesaan. Dalam hal ini Dana Desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi global. Namun pada kenyataannya, pada penelitian ini secara statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa masih belum mampu untuk menurunkan jumlah kemiskinan di Pulau Jawa.

4.5.2 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi *random effect model* pada tabel 4.8, pada variabel PDRB didapatkan nilai koefisien sebesar -1.5664 dengan nilai probabilitas 0.0000 lebih kecil dari alpha 1% yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa dengan arah hubungan yang negatif. Artinya, saat terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 satuan akan diikuti dengan menurunnya tingkat Kemiskinan di 80 kabupaten se Pulau Jawa sebesar 156.64 persen selama periode penelitian.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah & Asiyah (2022) yang menunjukkan hasil bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, bisa terjadi karena adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat yang disebabkan karena pertumbuhan PDRB hanya menghitung nilai tambah yang dihasilkan di suatu daerah tanpa melihat status kependudukan yang menghasilkan nilai tersebut (Nur Azizah, 2022).

Pada penelitian ini, terbukti bahwa PDRB mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, sejalan dengan data BPS yang menjelaskan bahwa Pulau Jawa merupakan salah satu provinsi sebagai penyumbang PDRB terbesar terhadap perekonomian nasional dan menjadi pusat aktivitas ekonomi Indonesia.

4.5.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi *random effect model* pada tabel 4.8, pada variabel Pengeluaran Pemerintah didapatkan nilai koefisien sebesar -0.4383 dengan nilai

probabilitas 0.0271 lebih kecil dari alpha 5% yang menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa dengan pengaruh negatif. Artinya, saat terjadi kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1 satuan akan diikuti dengan menurunnya tingkat Kemiskinan di 80 kabupaten se Pulau Jawa sebesar 43.83 persen selama periode penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tersebut digunakan dengan sebagaimana mestinya, yaitu fokus pada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan produktivitas ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean & Matondang (2019) yang menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Menurut (Panggabean & Matondang, 2019) hal yang menyebabkan Pengeluaran Pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan adalah salah satunya karena optimalisasi pemanfaatan dana untuk pembangunan daerah tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai peruntukannya.

4.5.6 Hubungan Harapan Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi *random effect model* pada tabel 4.8, pada variabel HLS didapatkan nilai koefisien sebesar -0.4414 dengan nilai probabilitas 0.0074 lebih kecil dari alpha 1% yang menunjukkan bahwa HLS berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan dengan pengaruh yang negatif. Artinya, saat terjadi kenaikan HLS sebesar 1 satuan akan diikuti dengan penurunan Kemiskinan pada 80 kabupaten di Pulau Jawa sebesar 44.14% selama periode penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariana (2024) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap Kemiskinan. Angka harapan lama sekolah menjadi salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas masyarakat yang mencerminkan peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan akses masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang lebih layak.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh dana desa, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan HLS terhadap kemiskinan di 80 kabupaten yang tersebar di Pulau Jawa menggunakan regresi data panel dengan metode *random effect model*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Desa menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap kemiskinan di 80 kabupaten di Pulau Jawa tahun 2018-2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi Dana Desa yang diturunkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa justru diikuti dengan meningkatnya penduduk miskin. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan dana desa masih belum efektif dan belum optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena terdapat kemungkinan bahwa dana tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan jangka pendek yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja dan tingginya kasus korupsi di sektor desa, dan alokasinya yang tidak tepat sasaran, serta dana desa ini belum sepenuhnya diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat yang mendorong ekonomi dan produktivitas masyarakat.
2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada 80 kabupaten di Pulau Jawa tahun 2018-2024 dengan pengaruh negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi daerah mampu secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PDRB dari Pulau Jawa yang besar terhadap pendapatan nasional mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang artinya sebagian besar hasil ekonomi daerah sudah dirasakan oleh masyarakat dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.
3. Variabel Pengeluaran Pemerintah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada 80 kabupaten di Pulau Jawa tahun 2018-2024 dengan hubungan negatif. Secara teoritis pengeluaran pemerintah mampu untuk menurunkan tingkat

kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan program sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang didapatkan signifikan berpengaruh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan belanja pemerintah daerah sudah digunakan untuk hal-hal yang efektif dan tepat sasaran, sehingga penggunaannya optimal dalam menekan angka kemiskinan di Pulau Jawa yang relatif tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain.

4. Variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan pengaruh signifikan dengan pengaruh negatif terhadap kemiskinan pada 80 kabupaten di Pulau Jawa tahun 2018-2024. Sesuai dengan teori yang penulis gunakan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi pada kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel HLS merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa.

5.2. Implikasi

1. Temuan pada variabel dana desa semakin menegaskan bahwa efektivitas dana desa sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dalam proses penyaluran dan pengelolaannya. Oleh karenanya, perlu dilaksanakan beberapa prinsip dalam distribusi dana desa, seperti harus adanya keterbukaan, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik agar penggunaan anggaran benar-benar tersalurkan secara merata dan adil sehingga mampu memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Dalam implementasinya, pengelolaan dana desa harus didasarkan pada efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang kemudian akan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan kesenjangan pembangunan, dan terpenting mampu mengurangi kemiskinan.
2. Hasil temuan yang ditunjukkan pada variabel PDRB mencerminkan bahwa adanya keseimbangan dalam distribusi hasil pembangunan, sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi merata pada seluruh lapisan masyarakat dan cenderung

tidak terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu. Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai output saja, tetapi juga fokus pada pemerataan hasil pertumbuhan. Pemerintah daerah perlu untuk mempertahankan strategi yang bersifat inklusif melalui memperluas penciptaan lapangan pekerjaan, mengembangkan sektor UMKM masyarakatnya, serta perbaikan dan peningkatan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi produktif. Selain itu kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat dari pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua masyarakat dan dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

3. Temuan yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan dengan arah yang negatif mengindikasikan bahwasannya belanja yang dilakukan pemerintah daerah sudah memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, tetap perlu adanya peningkatan efektivitas pengelolaan dalam belanja pemerintah daerah sebagai upaya menurunkan kemiskinan dengan cara, pemerintah daerah perlu melakukan adanya restrukturisasi prioritas anggaran pengeluaran daerah dengan lebih menekankan pada program-program yang memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut bisa seperti penguatan perlindungan sosial, perluasan dan perbaikan akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan pembangunan infrastruktur yang merata yang mendukung aktivitas ekonomi di daerah yang masih tertinggal, serta menguji efektivitas dan pemerataan program-program bantuan yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah sebelumnya.
4. Temuan yang menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah berpengaruh signifikan dengan hubungan yang negatif terhadap kemiskinan perlu terus dipertahankan dengan memperkuat peran dan pengawasannya. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pendidikan yang lebih layak terbukti mampu untuk meningkatkan produktivitas pada masyarakat sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakan yang mendorong pengentasan kemiskinan perlu untuk diarahkan kepada investasi jangka panjang untuk bidang pembangunan manusia, seperti perluasan

akses layanan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan keterampilan masyarakat sebagai tenaga kerja agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih tinggi di dalam dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, S. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tahun Pendidikan yang Diharapkan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Sumatera Selatan The Influence of Economic Growth, Expected Years of Schooling, and the Human Development Index on Poverty in South S.* 24(2), 71–79.
- Arsyad, L. (2020). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Volume 15, 2024. *BPS, 15*(Statistik 2024).
- BPS. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*.
[https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-
penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html)
- BPS. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024*.
[https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/10/ca543e942579ced46afd60
3b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2020-
2024.html](https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/10/ca543e942579ced46afd603b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2020-2024.html)
- BPS. (2026). *Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)*. Badan Pusat Statistik. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
- Chambers, R. (1983). Rural poverty unperceived. In *Rural Development* (pp. 1–27).
<https://doi.org/10.4324/9781315835815-1>
- Deviyanti, R., Siregar, B., Biyanto, F., & Miswanto. (2025). PENGARUH DANA DESA, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 5, 718.
- DJPb. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*.
[https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-
dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html](https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html)
- Ginting, A. M. (2015). The Influence of Regional Disparity on Poverty in Indonesia During 2004-2013. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, Dan Informasi DPR RI*, 20(1), 45–58. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/issue/view/150>
- Keynes, J. M. (1962). *The general theory of employment, interest and money / by John Maynard Keynes.* (pp. xii, 403 p.). Harcourt, Brace & World.
<https://catalog.hathitrust.org/Record/102290543>
- Khoirudin, R., & Haerusman, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2022. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i1.20>
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 30. <https://www.jstor.org/stable/1811581>

- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (III). ANDI.
- Marx, K. (1867). Capital: A Critique of Political Economy, Volume I (1867). *The Bloomsbury Companion to Marx*, I(2008), 63–80.
<https://doi.org/10.5040/9781474278737.ch-009>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (pp. xvi, 627 p.). McGraw-Hill Book Co.
<https://catalog.hathitrust.org/Record/007109025>
- Nur Assyafaah, Timbul Dompok, & Lubna Salsabila. (2025). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Publik*, 19(02), 151–163.
<https://doi.org/10.52434/jp.v19i02.444>
- Nur Azizah, A., & Nur Asiyah, B. (2022). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TIMUR. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2697–2718.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (1st ed.). Erlangga.
- Nurkse, R. (1953). *Vicious Cycle of Poverty*.
- Panggabean, M., & Matondang, E. R. L. (2019). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017*.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. In *The American Economic Review* (Vol. 51, Number 1, pp. 400–409).
- Sen, A. (1999). Development as freedom. *Sen, Amartya*, 1–384.
- Shoup, C. S. (1959). The Theory of Public Finance. *The American Economic Review*, 49(5), 1018–1029. <http://www.jstor.org/stable/1813080>
- Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (2nd ed.). Kencana Prenada media group.
- Sukirno, S. (2016). *MAKROEKONOMI : Teori Pengantar* (3rd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 14(3)(3), 138–139.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development Textbook: 13th Edition*.
<https://studylib.net/doc/27575301/f5v9e6-economic-development-2020>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 45 (2014).
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

- UNDP. (2016). UNDP AND THE CONCEPT AND MEASUREMENT OF POVERTY. *Www.Undp.Org/*, 11(5–6), 418–424. <https://doi.org/10.1590/S1020-49892002000500017>
- UNDP. (2023). Unstacking Global Poverty: Data for high impact action. *Global Multi-Dimensional Poverty Index 2023*, 1–2. <https://hdr.undp.org/content/2023-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI>
- UNDP. (2024). Human Development Report 2023 / 2024. In *European Union (EU). (2024). EU Missions and Operation.*
- Updesa.com. (2024). *Besaran Dana Desa 2024 sesuai UU dan Kemenkeu.* <https://updesa.com/besaran-dana-desa-2024/>
- Wagner, A. (1892). *Grundlegung der politischen Oekonomie.* (p. 2 v.). C.F. Winter. <https://catalog.hathitrust.org/Record/100321267>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: pengantar dan aplikasinya disertai panduan EVIEWS* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- World Bank. (2020). *Spending for Better Results.* 390.
- World Bank. (2022). *Overview Poverty and Prosperity Shared 2022: Correcting Ourse.* <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>
- Wulansari, R. Y., Fadhilah, N., Huda, M., Abidin, A. Z., & Sujianto, A. E. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 82–95. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.3928>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Persentase Penduduk Miskin, Dana Desa, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Dan HLS Pada 80 Kabupaten Tahun 2018-2024

No	Kabupaten	Tahun	PK	Dana Desa	PDRB	Pengeluaran Pemerintah	HLS	Covid -19
1	Bandung	2018	6.65	261.633.710	112.982	5.114	12.64	0
1		2019	5.94	311.070.693	123.486	5.782	12.68	0
1		2020	6.91	322.217.180	123.603	5.467	12.69	0
1		2021	7.15	334.046.576	130.477	5.498	12.70	1
1		2022	6.80	345.331.515	143.002	6.080	12.71	0
1		2023	6.40	366.813.940	153.951	6.096	12.73	0
1		2024	6.19	371.928.254	165.609	7.119	12.74	0
2	Bekasi	2018	4.37	197.271.667	305.560	5.057	13.05	0
2		2019	4.01	241.022.957	326.284	5.547	13.08	0
2		2020	4.82	257.786.371	317.943	5.479	13.09	0
2		2021	5.21	264.332.147	340.390	6.192	13.10	1
2		2022	5.01	264.353.007	367.562	6.169	13.11	0
2		2023	4.93	253.694.685	393.823	6.524	13.17	0
2		2024	4.80	256.998.129	421.324	7.344	13.18	0
3	Bogor	2018	7.14	402.984.941	219.240	7.304	11.90	0
3		2019	6.66	488.434.210	237.200	7.771	12.47	0
3		2020	7.69	511.893.929	235.887	8.405	12.48	0
3		2021	8.13	523.393.765	248.892	8.708	12.49	1
3		2022	7.73	544.358.095	267.744	9.310	12.50	0
3		2023	7.27	589.286.423	289.106	9.078	12.64	0
3		2024	7.05	599.108.260	311.713	11.114	12.75	0
4	Ciamis	2018	7.22	220.290.552	29.090	2.602	13.67	0
4		2019	6.65	254.821.787	31.536	2.692	13.79	0

4		2020	7.62	263.028.754	31.974	2.666	14.06	0
4		2021	7.97	263.615.735	33.688	2.706	14.20	1
4		2022	7.72	270.502.288	36.774	2.743	14.28	0
4		2023	7.42	259.544.809	39.841	2.649	14.29	0
4		2024	7.39	261.949.600	43.237	2.684	14.30	0
5	Cianjur	2018	9.81	349.329.452	42.971	4.000	11.90	0
5		2019	9.15	412.662.735	46.956	4.935	11.98	0
5		2020	10.36	427.760.763	47.535	3.907	11.99	0
5		2021	11.18	430.246.084	50.138	3.901	12.00	1
5		2022	10.55	442.113.458	53.989	3.997	12.01	0
5		2023	10.22	442.301.848	58.391	4.125	12.03	0
5		2024	10.14	448.350.429	64.404	4.596	12.04	0
6	Cirebon	2018	10.70	370.821.922	45.499	3.681	12.22	0
6		2019	9.94	436.288.708	49.136	3.023	12.24	0
6		2020	11.24	456.827.649	49.562	3.694	12.25	0
6		2021	12.30	454.574.807	52.310	3.942	12.27	1
6		2022	12.01	471.363.639	56.654	3.988	12.28	0
6		2023	11.20	454.999.253	61.310	3.799	12.41	0
6		2024	11.00	462.020.082	67.196	4.608	12.42	0
7	Garut	2018	9.27	401.196.915	53.036	4.257	11.80	0
7		2019	8.98	484.184.357	57.875	4.011	11.82	0
7		2020	9.98	509.491.067	58.043	4.381	11.91	0
7		2021	10.65	506.831.553	60.836	4.646	12.03	1
7		2022	10.42	518.247.019	66.591	4.543	12.15	0
7		2023	9.77	480.458.664	72.229	4.622	12.16	0
7		2024	9.68	487.787.207	78.825	4.928	12.17	0
8	Indramayu	2018	11.89	313.434.754	74.920	3.250	12.22	0
8		2019	11.11	372.069.062	80.390	3.751	12.24	0
8		2020	12.70	393.638.379	79.286	3.312	12.25	0
8		2021	13.04	396.162.113	81.595	3.257	12.26	1

8		2022	12.77	401.253.897	90.773	3.197	12.27	0
8		2023	12.13	341.601.699	103.560	3.535	12.29	0
8		2024	11.93	345.652.594	105.589	3.736	12.32	0
9	Karawang	2018	8.06	280.151.332	215.547	4.315	12.07	0
9		2019	7.39	341.088.318	230.021	4.673	12.08	0
9		2020	8.26	346.104.755	225.064	4.169	12.09	0
9		2021	8.95	349.344.485	243.713	4.671	12.10	1
9		2022	8.44	355.943.391	268.229	4.804	12.19	0
9		2023	7.87	344.345.343	290.916	4.947	12.20	0
9		2024	7.86	348.461.932	309.843	5.774	12.21	0
10	Kuningan	2018	12.22	261.945.042	22.764	2.508	12.07	0
10		2019	11.41	298.926.989	25.093	2.650	12.10	0
10		2020	12.82	307.069.415	25.619	5.479	12.22	0
10		2021	13.10	305.029.334	26.919	6.192	12.23	1
10		2022	12.76	315.201.708	29.520	2.602	12.24	0
10		2023	12.12	342.964.640	32.545	2.692	12.26	0
10		2024	11.88	346.460.522	35.536	2.874	12.27	0
11	Majalengka	2018	10.79	315.691.541	28.098	2.777	12.19	0
11		2019	10.06	376.682.253	31.202	2.013	12.21	0
11		2020	11.43	395.234.824	32.179	3.225	12.22	0
11		2021	12.33	391.668.514	34.157	3.105	12.23	1
11		2022	11.94	389.573.880	37.777	2.989	12.24	0
11		2023	11.21	319.732.709	41.744	2.840	12.26	0
11		2024	10.82	325.862.554	46.303	3.180	12.27	0
12	Purwakarta	2018	7.99	141.497.855	63.117	1.920	12.09	0
12		2019	7.48	167.398.755	67.742	1.280	12.10	0
12		2020	8.27	169.446.203	67.176	1.974	12.11	0
12		2021	8.83	170.355.883	70.778	2.397	12.12	1
12		2022	8.70	172.438.898	76.478	2.242	12.13	0
12		2023	8.46	185.441.490	82.129	2.164	12.18	0

12		2024	8.41	189.493.694	88.255	2.559	12.25	0
13	Subang	2018	8.67	186.150.082	37.520	2.759	11.68	0
13		2019	8.12	208.795.750	40.281	2.053	11.69	0
13		2020	9.31	215.253.211	39.595	2.693	11.70	0
13		2021	10.03	220.076.242	42.293	2.917	11.71	1
13		2022	9.75	234.728.039	46.160	3.170	11.78	0
13		2023	9.52	273.767.528	49.692	3.036	11.91	0
13		2024	9.49	277.799.988	54.946	3.605	12.11	0
14	Sukabumi	2018	6.76	307.727.527	61.615	3.832	12.20	0
14		2019	6.22	354.347.829	67.426	3.081	12.22	0
14		2020	7.09	370.128.471	67.462	4.027	12.23	0
14		2021	7.70	377.384.015	70.738	4.059	12.24	1
14		2022	7.34	401.786.292	76.244	4.057	12.25	0
14		2023	7.01	436.532.604	82.317	4.127	12.38	0
14		2024	6.87	440.497.000	88.142	4.570	12.39	0
15	Sumedang	2018	9.76	192.693.343	32.533	2.689	12.94	0
15		2019	9.05	218.940.543	35.440	2.022	12.96	0
15		2020	10.26	225.307.089	35.489	2.868	12.97	0
15		2021	10.71	227.319.620	37.062	2.712	12.98	1
15		2022	10.14	238.130.726	40.025	2.930	12.99	0
15		2023	9.36	270.187.429	43.327	2.688	13.01	0
15		2024	9.10	273.359.772	47.128	3.083	13.02	0
16	Tasikmalaya	2018	9.85	325.551.302	34.024	3.463	12.48	0
16		2019	9.12	390.383.696	37.310	3.794	12.52	0
16		2020	10.34	403.244.314	37.443	3.687	12.53	0
16		2021	11.15	402.887.661	39.286	3.241	12.54	1
16		2022	10.73	410.638.722	42.660	3.171	12.59	0
16		2023	10.28	391.495.129	46.098	3.056	12.63	0
16		2024	10.23	397.540.069	49.783	3.741	12.64	0
17	Bandung Barat	2018	10.06	199.563.747	43.808	2.643	11.83	0

17		2019	9.38	241.510.582	47.180	2.941	11.86	0
17		2020	10.49	252.987.831	46.479	2.639	11.87	0
17		2021	11.30	257.381.269	48.764	2.917	11.88	1
17		2022	10.82	252.779.336	52.921	2.893	11.89	0
17		2023	10.52	238.089.429	56.945	2.983	11.91	0
17		2024	10.49	242.414.287	61.236	3.358	12.00	0
18	Pangandaran	2018	8.12	77.427.209	10.352	1.161	12.04	0
18		2019	7.71	89.358.559	11.312	1.461	12.06	0
18		2020	8.99	89.358.559	11.498	1.565	12.07	0
18		2021	9.65	90.603.565	12.130	1.349	12.08	1
18		2022	9.32	86.475.185	13.164	1.447	12.11	0
18		2023	8.98	95.018.623	14.256	1.434	12.30	0
18		2024	8.75	97.056.337	15.475	1.645	12.31	0
19	Banjarnegara	2018	15.46	221.842.482	20.070	2.119	11.42	0
19		2019	14.76	262.654.461	21.599	2.222	11.45	0
19		2020	15.64	268.003.259	21.694	2.259	11.46	0
19		2021	16.23	265.745.328	22.828	2.042	11.63	1
19		2022	15.20	266.535.723	24.996	2.039	11.81	0
19		2023	14.90	277.886.659	27.192	2.176	11.82	0
19		2024	14.71	280.465.546	29.231	2.225	11.83	0
20	Banyumas	2018	13.50	298.545.418	49.896	3.319	12.64	0
20		2019	12.53	360.743.521	53.949	3.725	12.82	0
20		2020	13.26	381.798.090	53.682	3.773	12.85	0
20		2021	13.66	381.247.099	56.920	3.430	13.03	1
20		2022	12.84	383.196.882	62.817	3.600	13.21	0
20		2023	12.53	346.592.982	68.752	3.500	13.26	0
20		2024	11.95	350.188.583	74.163	4.064	13.34	0
21	Batang	2018	8.69	167.511.013	20.181	1.687	11.88	0
21		2019	8.35	192.327.469	21.586	1.919	12.00	0
21		2020	9.13	195.614.218	21.619	1.925	12.01	0

21		2021	9.68	195.721.522	23.126	1.780	12.13	1
21		2022	8.98	200.193.418	25.444	1.801	12.14	0
21		2023	8.92	216.576.622	27.890	1.800	12.15	0
21		2024	8.73	220.585.173	30.389	1.956	12.17	0
22	Blora	2018	11.90	229.074.481	24.632	2.116	12.14	0
22		2019	11.32	268.253.846	25.967	2.322	12.19	0
22		2020	11.96	270.000.037	23.987	2.012	12.20	0
22		2021	12.39	267.071.340	26.929	2.113	12.35	1
22		2022	11.53	265.277.093	30.937	2.396	12.44	0
22		2023	11.49	258.020.113	31.738	2.355	12.51	0
22		2024	11.42	261.640.513	33.231	2.548	12.60	0
23	Boyolali	2018	10.04	192.935.985	30.259	2.203	12.16	0
23		2019	9.53	219.802.085	32.666	2.513	12.43	0
23		2020	10.18	219.802.085	32.688	2.480	12.56	0
23		2021	10.62	216.981.458	34.897	2.268	12.57	1
23		2022	9.82	223.033.286	38.788	2.471	12.62	0
23		2023	9.81	258.860.591	42.725	2.433	12.66	0
23		2024	9.63	263.544.832	45.853	2.402	12.67	0
24	Brebes	2018	17.17	343.915.727	42.973	2.825	12.02	0
24		2019	16.22	441.009.459	46.188	3.308	12.03	0
24		2020	17.03	495.634.148	47.059	3.293	12.04	0
24		2021	17.43	492.478.504	48.966	3.126	12.05	1
24		2022	16.05	453.819.700	53.648	3.091	12.15	0
24		2023	15.78	328.233.319	57.512	2.989	12.44	0
24		2024	15.60	334.920.782	62.045	3.520	12.45	0
25	Cilacap	2018	11.25	243.267.268	109.700	3.260	12.48	0
25		2019	10.73	287.722.232	114.086	3.584	12.49	0
25		2020	11.46	296.800.979	104.543	3.219	12.50	0
25		2021	11.67	299.567.198	109.654	3.329	12.63	1
25		2022	11.02	309.114.066	121.022	3.402	12.66	0

25		2023	10.99	321.870.697	132.442	3.501	12.67	0
25		2024	10.68	325.538.295	135.991	3.890	12.69	0
26	Demak	2018	12.54	229.662.643	24.429	2.050	12.86	0
26		2019	11.86	276.950.857	26.184	2.562	13.01	0
26		2020	12.54	287.089.488	26.540	2.400	13.31	0
26		2021	12.92	284.463.387	27.650	2.336	13.32	1
26		2022	12.09	280.456.401	30.252	2.487	13.33	0
26		2023	12.01	255.703.420	33.017	2.423	13.34	0
26		2024	11.89	257.919.131	35.459	2.718	13.36	0
27	Grobogan	2018	12.31	246.285.582	25.407	2.345	12.28	0
27		2019	11.77	289.687.819	27.279	2.746	12.29	0
27		2020	12.46	304.990.065	27.265	2.680	12.30	0
27		2021	12.74	303.339.252	28.815	2.428	12.44	1
27		2022	11.80	307.655.877	31.807	2.687	12.45	0
27		2023	11.72	304.184.399	34.760	2.664	12.46	0
27		2024	11.43	308.964.196	37.506	2.946	12.48	0
28	Jepara	2018	7.00	191.881.485	27.997	2.300	12.71	0
28		2019	6.66	234.090.663	30.230	2.528	12.74	0
28		2020	7.17	249.106.533	30.169	2.399	12.75	0
28		2021	7.44	250.171.633	32.046	2.309	12.76	1
28		2022	6.88	245.689.231	35.036	2.429	12.77	0
28		2023	6.61	207.388.977	38.047	2.431	12.85	0
28		2024	6.09	209.300.195	40.564	2.563	12.86	0
29	Karanganyar	2018	10.01	139.229.018	34.324	2.064	13.66	0
29		2019	9.55	160.000.995	37.075	2.469	13.67	0
29		2020	10.28	167.891.190	37.074	2.346	13.68	0
29		2021	10.68	169.314.064	39.157	2.138	13.69	1
29		2022	9.85	169.874.596	43.088	2.203	13.70	0
29		2023	9.79	175.562.791	47.204	2.299	13.71	0
29		2024	9.59	176.804.826	51.332	2.388	13.73	0

30	Kebumen	2018	17.47	350.115.647	26.037	2.652	12.91	0
30		2019	16.82	396.569.628	27.968	3.021	13.04	0
30		2020	17.59	409.878.212	28.015	3.044	13.34	0
30		2021	17.83	405.260.453	29.563	2.779	13.35	1
30		2022	16.41	416.756.373	32.615	2.824	13.36	0
30		2023	16.34	444.275.016	35.764	2.977	13.37	0
30		2024	15.71	450.602.551	38.605	3.025	13.39	0
31	Kendal	2018	9.84	216.593.703	39.549	2.148	12.70	0
31		2019	9.41	240.437.047	42.551	2.440	12.80	0
31		2020	9.99	251.320.499	42.581	2.451	12.95	0
31		2021	10.24	251.060.030	45.165	2.069	12.96	1
31		2022	9.48	255.193.805	49.662	2.499	12.97	0
31		2023	9.39	254.567.478	54.364	2.475	12.99	0
31		2024	9.35	260.416.596	58.837	2.554	13.00	0
32	Klaten	2018	12.96	321.520.294	36.994	2.973	13.13	0
32		2019	12.28	374.660.994	39.776	3.084	13.24	0
32		2020	12.89	385.072.138	39.940	2.907	13.25	0
32		2021	13.49	380.846.601	42.271	2.493	13.39	1
32		2022	12.33	379.432.533	46.592	2.527	13.40	0
32		2023	12.28	369.793.696	51.274	2.843	13.41	0
32		2024	12.04	372.629.107	55.249	3.045	13.43	0
33	Kudus	2018	6.98	119.227.194	104.056	1.957	13.21	0
33		2019	6.68	139.077.753	110.595	2.260	13.22	0
33		2020	7.31	149.152.722	109.160	1.911	13.23	0
33		2021	7.60	151.169.588	108.725	1.879	13.24	1
33		2022	7.41	146.122.990	114.560	2.231	13.25	0
33		2023	7.24	133.255.036	121.364	2.384	13.26	0
33		2024	7.23	134.545.491	128.612	2.198	13.28	0
34	Magelang	2018	11.23	329.260.677	30.339	2.486	12.48	0
34		2019	10.67	383.071.777	32.491	2.797	12.53	0

34		2020	11.27	395.010.278	32.462	2.719	12.54	0
34		2021	11.91	391.044.109	34.176	2.413	12.55	1
34		2022	11.09	393.231.309	37.432	2.570	12.58	0
34		2023	10.96	355.843.704	40.680	2.687	12.61	0
34		2024	10.83	358.648.761	43.736	2.993	12.62	0
35	Pati	2018	9.90	362.612.350	39.901	2.725	12.30	0
35		2019	9.46	417.038.558	43.062	3.091	12.41	0
35		2020	10.08	430.714.441	43.316	2.910	12.65	0
35		2021	10.21	426.380.834	45.566	2.623	12.94	1
35		2022	9.33	427.096.131	50.189	2.717	12.95	0
35		2023	9.31	372.985.244	54.751	2.698	12.96	0
35		2024	9.17	376.311.437	59.015	3.097	12.98	0
36	Pekalongan	2018	10.06	222.592.756	21.314	2.160	12.17	0
36		2019	9.71	259.749.216	22.857	2.353	12.40	0
36		2020	10.19	266.336.610	22.803	2.446	12.41	0
36		2021	10.57	263.397.106	24.030	2.075	12.42	1
36		2022	9.67	263.868.873	25.963	2.123	12.43	0
36		2023	9.67	257.679.902	28.112	2.180	12.44	0
36		2024	8.95	262.339.746	30.224	2.486	12.46	0
37	Pemalang	2018	16.04	248.799.035	23.671	2.324	11.91	0
37		2019	15.41	301.814.036	25.484	2.948	11.94	0
37		2020	16.02	329.535.761	25.810	2.836	11.95	0
37		2021	16.56	328.015.879	27.444	2.524	11.96	1
37		2022	15.06	320.431.408	29.915	2.504	11.98	0
37		2023	15.03	255.237.209	32.353	2.539	12.01	0
37		2024	14.92	259.937.326	34.889	2.826	12.02	0
38	Purbalingga	2018	15.62	199.651.735	23.190	1.924	11.95	0
38		2019	15.03	237.221.605	24.918	2.201	11.98	0
38		2020	15.90	248.095.972	25.094	2.104	11.99	0
38		2021	16.24	246.883.340	26.394	1.999	12.00	1

38		2022	15.30	247.368.204	28.824	2.122	12.01	0
38		2023	14.99	248.274.033	31.225	2.068	12.02	0
38		2024	14.18	250.941.289	33.357	2.223	12.03	0
39	Purworejo	2018	11.67	325.602.817	17.408	2.255	13.48	0
39		2019	11.45	369.061.708	18.658	2.282	13.49	0
39		2020	11.78	369.061.708	18.646	2.483	13.50	0
39		2021	12.40	363.993.225	19.603	2.135	13.51	1
39		2022	11.53	346.454.872	21.353	2.347	13.52	0
39		2023	11.33	371.833.451	23.188	2.283	13.53	0
39		2024	10.87	374.225.188	24.801	2.318	13.55	0
40	Rembang	2018	15.41	228.728.361	17.690	1.814	12.05	0
40		2019	14.95	258.436.412	18.944	1.975	12.10	0
40		2020	15.60	263.625.423	18.944	2.054	12.11	0
40		2021	15.80	260.523.814	20.071	1.836	12.12	1
40		2022	14.65	252.064.026	22.107	1.991	12.13	0
40		2023	14.17	240.767.753	24.130	1.929	13.05	0
40		2024	14.02	243.424.874	25.794	1.982	12.30	0
41	Semarang	2018	7.29	158.450.698	46.188	2.171	12.85	0
41		2019	7.04	181.931.854	49.638	2.492	12.94	0
41		2020	7.51	186.914.532	49.034	2.457	12.97	0
41		2021	7.82	188.339.520	51.796	2.198	12.98	1
41		2022	7.27	190.973.161	56.609	2.536	13.04	0
41		2023	7.17	200.079.055	61.261	2.423	13.05	0
41		2024	6.96	203.116.237	65.585	2.641	13.06	0
42	Sragen	2018	13.12	146.610.871	35.100	2.236	12.65	0
42		2019	12.79	168.044.095	37.836	2.578	12.69	0
42		2020	13.38	173.221.301	37.851	2.422	12.83	0
42		2021	13.83	175.365.649	40.088	2.160	12.84	1
42		2022	12.94	182.671.645	44.243	2.306	12.91	0
42		2023	12.87	208.127.799	48.570	2.504	12.92	0

42		2024	12.41	210.594.475	52.434	2.554	12.93	0
43	Sukoharjo	2018	7.41	127.001.352	34.211	2.050	13.81	0
43		2019	7.14	146.662.487	36.971	2.143	13.82	0
43		2020	7.68	146.662.487	36.891	2.401	13.83	0
43		2021	8.23	148.043.106	38.990	2.089	13.84	1
43		2022	7.61	148.559.522	42.781	2.042	13.90	0
43		2023	7.58	156.983.503	46.521	2.235	13.91	0
43		2024	7.47	158.952.647	49.987	2.442	13.92	0
44	Tegal	2018	7.94	281.896.357	32.770	2.575	12.34	0
44		2019	7.64	340.958.369	35.232	2.815	12.58	0
44		2020	8.14	361.348.720	35.300	2.905	12.67	0
44		2021	8.60	359.453.876	37.335	2.776	12.89	1
44		2022	7.90	359.781.317	40.770	2.722	12.91	0
44		2023	7.30	300.740.717	44.440	2.845	12.92	0
44		2024	6.81	308.435.961	47.721	3.235	12.96	0
45	Temanggung	2018	9.87	211.615.329	20.229	1.670	12.08	0
45		2019	9.42	241.944.648	21.649	1.969	12.13	0
45		2020	9.96	250.756.487	21.558	1.996	12.14	0
45		2021	10.17	247.881.825	22.628	1.877	12.32	1
45		2022	9.33	245.879.771	24.726	1.958	12.55	0
45		2023	9.26	235.340.840	26.912	2.042	12.61	0
45		2024	8.67	239.320.576	28.924	2.137	12.62	0
46	Wonogiri	2018	10.75	198.552.505	27.137	2.246	12.45	0
46		2019	10.25	227.393.914	29.047	2.685	12.48	0
46		2020	10.86	227.393.914	29.154	2.477	12.49	0
46		2021	11.55	224.681.357	30.581	2.297	12.50	1
46		2022	10.99	213.561.759	33.692	2.243	12.51	0
46		2023	10.94	252.712.712	36.946	2.475	12.52	0
46		2024	10.71	254.184.550	39.762	2.625	12.61	0
47	Wonosobo	2018	17.58	184.100.308	17.493	1.856	11.69	0

47		2019	16.63	212.114.096	18.854	2.214	11.74	0
47		2020	17.36	219.777.303	18.839	2.070	11.75	0
47		2021	17.67	218.728.665	19.857	1.860	11.76	1
47		2022	16.17	221.885.021	21.587	2.011	11.78	0
47		2023	15.58	241.533.073	23.330	2.105	11.80	0
47		2024	15.28	243.674.506	25.028	2.215	11.81	0
48	Bangkalan	2018	19.59	268.326.025	23.847	1.686	11.58	0
48		2019	18.90	330.890.066	24.664	2.496	11.59	0
48		2020	20.56	330.890.066	23.290	2.116	11.60	0
48		2021	21.57	327.939.755	24.757	2.211	11.73	1
48		2022	19.44	317.495.477	27.164	2.264	11.91	0
48		2023	19.35	304.577.576	27.740	2.273	11.97	0
48		2024	18.66	305.612.438	28.739	2.273	11.98	0
49	Banyuwangi	2018	7.80	171.594.506	77.842	2.415	12.69	0
49		2019	7.52	200.471.705	83.596	3.282	12.78	0
49		2020	8.06	212.947.095	81.103	3.140	12.80	0
49		2021	8.07	220.080.459	85.919	3.093	13.10	1
49		2022	7.51	221.710.360	93.279	3.327	13.11	0
49		2023	7.34	224.082.023	101.297	3.617	13.12	0
49		2024	6.54	227.001.570	108.923	3.318	13.14	0
50	Blitar	2018	9.72	164.197.753	34.117	1.835	12.44	0
50		2019	8.94	185.804.655	36.447	2.657	12.45	0
50		2020	9.33	191.476.398	36.024	2.282	12.46	0
50		2021	9.65	194.591.362	37.820	2.294	12.63	1
50		2022	8.71	204.807.099	41.379	2.468	12.64	0
50		2023	8.69	228.656.418	44.892	2.618	12.65	0
50		2024	8.16	230.840.552	47.779	2.748	12.67	0
51	Bojonegoro	2018	13.16	317.899.182	73.229	2.973	12.35	0
51		2019	12.38	367.201.310	78.046	7.128	12.36	0
51		2020	12.87	367.201.310	70.259	4.358	12.39	0

51		2021	13.27	362.673.177	84.201	5.086	12.68	1
51		2022	12.21	359.638.150	100.493	5.378	12.84	0
51		2023	12.18	395.962.330	97.972	6.348	12.92	0
51		2024	11.69	398.873.433	101.794	6.582	13.18	0
52	Bondowoso	2018	14.39	197.476.931	18.495	1.935	12.95	0
52		2019	13.33	230.866.115	19.854	2.360	13.27	0
52		2020	14.17	238.475.671	19.936	1.957	13.28	0
52		2021	14.73	236.217.008	21.052	1.963	13.29	1
52		2022	13.47	231.667.832	22.902	1.900	13.31	0
52		2023	13.34	218.497.440	24.773	2.018	13.32	0
52		2024	12.60	220.049.411	26.543	2.126	13.33	0
53	Gresik	2018	11.89	246.315.128	130.229	2.643	13.71	0
53		2019	11.35	280.483.802	138.894	3.334	13.72	0
53		2020	12.40	287.891.804	134.269	3.095	13.73	0
53		2021	12.42	287.422.375	144.656	3.192	13.77	1
53		2022	11.06	294.720.837	163.908	3.554	13.96	0
53		2023	10.96	309.991.419	176.261	3.418	13.97	0
53		2024	10.32	312.367.667	188.605	3.696	13.98	0
54	Jember	2018	9.98	237.360.038	72.012	3.339	13.21	0
54		2019	9.25	285.367.067	77.226	4.557	13.22	0
54		2020	10.09	305.112.329	76.040	3.297	13.42	0
54		2021	10.41	312.422.908	81.069	3.733	13.43	1
54		2022	9.39	315.343.690	88.030	4.016	13.44	0
54		2023	9.51	317.667.883	95.290	3.802	13.49	0
54		2024	9.01	319.829.871	102.758	3.829	13.50	0
55	Jombang	2018	9.56	238.494.888	37.880	2.353	12.99	0
55		2019	9.22	274.889.392	40.452	3.131	13.00	0
55		2020	9.94	280.150.133	39.871	2.527	13.27	0
55		2021	10.00	280.590.734	41.747	2.785	13.57	1
55		2022	9.04	293.111.955	45.936	2.879	13.58	0

55		2023	9.15	307.473.648	49.984	2.940	13.59	0
55		2024	8.60	310.381.146	53.899	3.119	13.61	0
56	Kediri	2018	11.31	272.006.205	38.588	2.711	12.87	0
56		2019	10.42	310.974.159	41.184	3.496	12.88	0
56		2020	11.40	322.882.645	40.627	2.831	13.15	0
56		2021	11.64	321.499.133	42.693	2.937	13.44	1
56		2022	10.65	337.478.649	46.650	3.154	13.61	0
56		2023	10.72	372.386.307	50.638	3.288	13.62	0
56		2024	9.95	375.359.228	54.650	3.486	13.63	0
57	Lamongan	2018	13.80	322.012.143	37.224	2.769	13.46	0
57		2019	13.21	367.123.481	39.725	3.038	13.47	0
57		2020	13.85	371.757.666	39.170	2.823	13.48	0
57		2021	13.86	367.859.016	41.043	2.871	13.77	1
57		2022	12.53	384.739.389	45.441	3.188	14.01	0
57		2023	12.42	407.204.635	48.927	3.161	14.02	0
57		2024	12.16	410.055.236	52.077	3.207	14.03	0
58	Lumajang	2018	9.98	164.055.106	30.690	1.667	11.79	0
58		2019	9.49	189.221.532	32.621	2.380	11.80	0
58		2020	9.83	195.267.518	32.062	2.028	11.81	0
58		2021	10.05	197.621.278	33.679	2.150	11.88	1
58		2022	9.06	203.080.258	36.664	2.248	12.02	0
58		2023	8.93	212.912.011	40.073	2.118	12.16	0
58		2024	8.65	215.332.228	43.059	2.213	12.41	0
59	Madiun	2018	11.42	142.881.185	17.636	1.590	13.13	0
59		2019	10.54	162.170.498	18.932	2.106	13.14	0
59		2020	11.46	162.591.055	18.917	1.796	13.16	0
59		2021	11.91	163.773.167	20.024	1.866	13.17	1
59		2022	10.79	167.769.564	21.859	2.059	13.18	0
59		2023	11.04	191.091.276	23.833	2.118	13.23	0
59		2024	10.63	193.737.573	25.549	2.266	13.27	0

60	Magetan	2018	10.31	148.190.103	17.624	1.679	13.73	0
60		2019	9.61	167.714.460	18.850	2.188	14.00	0
60		2020	10.35	171.377.664	18.772	1.790	14.03	0
60		2021	10.66	171.218.734	19.588	1.773	14.04	1
60		2022	9.84	172.413.890	21.195	1.971	14.05	0
60		2023	9.80	185.929.926	22.922	1.982	14.07	0
60		2024	9.32	187.519.819	24.577	2.075	14.08	0
61	Malang	2018	10.37	320.340.658	96.828	3.126	12.87	0
61		2019	9.47	365.827.590	103.744	4.482	13.17	0
61		2020	10.15	383.481.676	102.028	3.905	13.18	0
61		2021	10.50	388.606.827	107.036	3.873	13.24	1
61		2022	9.55	409.736.726	117.422	4.330	13.38	0
61		2023	9.45	452.532.871	128.373	4.303	13.48	0
61		2024	8.98	457.496.320	138.423	4.522	13.49	0
62	Mojokerto	2018	10.08	208.462.404	76.678	2.342	12.53	0
62		2019	9.75	235.653.897	82.388	2.877	12.61	0
62		2020	10.57	238.168.355	81.941	1.950	12.88	0
62		2021	10.62	238.562.799	87.145	2.443	12.95	1
62		2022	9.71	253.872.807	95.798	2.620	12.96	0
62		2023	9.80	286.840.742	104.364	2.715	12.97	0
62		2024	9.37	290.189.037	113.130	2.899	12.99	0
63	Nganjuk	2018	12.11	239.042.120	24.782	2.263	12.84	0
63		2019	11.24	278.092.493	26.651	2.805	12.85	0
63		2020	11.62	287.836.252	26.601	2.383	12.86	0
63		2021	11.85	286.114.908	28.053	2.395	12.87	1
63		2022	10.70	288.803.997	30.820	2.665	13.07	0
63		2023	10.89	264.423.074	33.647	2.703	13.17	0
63		2024	10.17	266.130.775	36.271	2.928	13.18	0
64	Ngawi	2018	14.83	168.572.918	19.140	1.810	12.68	0
64		2019	14.39	192.609.327	20.433	2.406	12.69	0

64		2020	15.44	197.263.598	20.271	2.146	12.70	0
64		2021	15.57	198.596.447	20.814	2.205	12.83	1
64		2022	14.15	203.269.311	22.455	2.294	12.84	0
64		2023	14.40	229.781.332	24.325	2.441	12.85	0
64		2024	13.81	231.211.830	25.945	2.437	12.89	0
65	Pacitan	2018	14.19	126.503.528	14.968	1.629	12.61	0
65		2019	13.67	145.072.735	15.962	2.020	12.62	0
65		2020	14.54	150.656.730	15.785	1.570	12.64	0
65		2021	15.11	151.108.021	16.381	1.610	12.65	1
65		2022	13.80	150.896.400	17.986	1.662	12.66	0
65		2023	13.65	167.205.216	19.491	1.770	12.68	0
65		2024	13.08	169.592.446	20.657	1.825	12.69	0
66	Pamekasan	2018	14.47	165.936.185	15.913	1.670	13.62	0
66		2019	13.95	198.798.859	17.029	2.401	13.63	0
66		2020	14.60	204.903.215	16.794	2.059	13.64	0
66		2021	15.30	203.966.703	17.659	1.977	13.65	1
66		2022	13.93	198.575.032	19.263	1.649	13.67	0
66		2023	13.85	197.259.886	20.881	2.039	13.68	0
66		2024	13.41	199.105.392	22.492	2.067	13.69	0
67	Pasuruan	2018	9.45	302.571.464	135.866	3.140	12.30	0
67		2019	8.68	362.897.025	145.876	3.698	12.31	0
67		2020	9.26	368.742.957	145.592	3.238	12.41	0
67		2021	9.70	365.663.562	157.151	3.273	12.58	1
67		2022	8.96	370.829.419	172.654	3.450	12.76	0
67		2023	9.24	341.926.186	186.946	3.733	12.77	0
67		2024	8.63	348.617.660	201.665	3.746	12.78	0
68	Ponorogo	2018	10.36	216.309.473	19.174	2.218	13.71	0
68		2019	9.64	252.106.956	20.484	2.483	13.72	0
68		2020	9.95	257.356.035	20.513	2.228	13.73	0
68		2021	10.26	255.221.886	21.350	2.112	13.74	1

68		2022	9.32	258.704.586	23.028	2.485	13.76	0
68		2023	9.53	255.901.720	25.248	2.485	13.77	0
68		2024	9.11	257.867.700	27.047	3.498	13.78	0
69	Probolinggo	2018	18.71	324.435.332	32.012	2.121	12.07	0
69		2019	17.76	392.410.257	34.014	2.581	12.34	0
69		2020	18.61	432.707.687	33.721	2.302	12.35	0
69		2021	18.91	429.195.412	35.606	2.234	12.36	1
69		2022	17.12	403.909.728	38.933	2.343	12.58	0
69		2023	17.19	336.014.953	42.377	3.261	12.63	0
69		2024	16.45	338.111.338	45.675	3.571	12.64	0
70	Sampang	2018	21.21	179.596.216	19.105	1.688	11.76	0
70		2019	20.71	232.543.589	19.789	1.970	12.08	0
70		2020	22.78	233.187.661	19.843	1.730	12.37	0
70		2021	23.76	231.888.794	20.639	1.836	12.38	1
70		2022	21.61	227.571.894	23.009	2.119	12.39	0
70		2023	21.76	224.094.810	24.087	2.009	12.54	0
70		2024	20.83	229.620.654	24.882	2.037	12.55	0
71	Sidoarjo	2018	5.69	253.643.547	189.256	4.060	14.75	0
71		2019	5.32	295.899.068	204.202	5.423	14.91	0
71		2020	5.59	296.168.960	197.241	4.430	14.93	0
71		2021	5.93	298.963.136	210.650	4.936	14.94	1
71		2022	5.36	315.207.304	245.227	4.849	14.95	0
71		2023	5.00	315.057.014	273.698	5.001	14.97	0
71		2024	4.53	320.199.548	296.887	5.246	15.22	0
72	Situbondo	2018	11.82	115.414.807	18.858	1.469	13.01	0
72		2019	11.20	133.156.458	20.210	1.973	13.14	0
72		2020	12.22	139.269.225	20.042	1.696	13.15	0
72		2021	12.63	140.843.095	21.201	1.652	13.16	1
72		2022	11.78	137.587.526	23.129	1.778	13.18	0
72		2023	11.90	147.780.620	25.225	1.900	13.19	0

72		2024	11.51	150.694.406	27.102	1.861	13.20	0
73	Sumenep	2018	20.16	276.309.656	32.704	2.124	13.07	0
73		2019	19.48	338.395.871	33.299	2.876	13.19	0
73		2020	20.18	341.286.410	32.750	2.544	13.20	0
73		2021	20.51	337.720.100	35.300	2.390	13.33	1
73		2022	18.76	332.807.461	40.255	2.364	13.51	0
73		2023	18.70	350.788.483	42.967	2.597	13.58	0
73		2024	17.78	354.471.823	45.222	2.851	13.59	0
74	Trenggalek	2018	12.02	127.827.455	17.355	1.694	12.12	0
74		2019	10.98	148.700.015	18.553	2.290	12.25	0
74		2020	11.62	154.882.638	18.314	1.861	12.35	0
74		2021	12.14	156.421.774	19.198	1.861	12.47	1
74		2022	10.96	156.889.772	20.882	2.167	12.50	0
74		2023	10.63	161.879.416	22.740	1.939	12.62	0
74		2024	10.50	163.248.149	24.365	1.976	12.63	0
75	Tuban	2018	15.31	225.648.488	60.739	2.347	12.19	0
75		2019	14.58	256.256.128	64.993	2.817	12.20	0
75		2020	15.91	263.445.066	62.323	2.463	12.21	0
75		2021	16.31	263.955.832	65.912	2.464	12.22	1
75		2022	15.02	280.860.593	75.188	2.721	12.24	0
75		2023	14.91	299.100.896	81.860	3.574	12.27	0
75		2024	14.36	302.127.826	87.111	3.558	12.54	0
76	Tulungagung	2018	7.27	205.680.279	36.496	2.428	13.05	0
76		2019	6.74	233.413.883	39.215	3.018	13.15	0
76		2020	7.33	237.663.966	38.226	2.643	13.31	0
76		2021	7.51	237.606.485	40.167	2.753	13.32	1
76		2022	6.71	245.102.197	44.133	2.913	13.33	0
76		2023	6.53	244.856.659	47.964	2.916	13.34	0
76		2024	6.28	246.907.389	51.247	2.876	13.36	0
77	Lebak	2018	8.41	238.375.414	26.603	2.446	11.93	0

77		2019	8.30	286.755.343	28.757	2.658	11.96	0
77		2020	9.24	289.814.468	29.055	2.404	11.97	0
77		2021	10.29	294.233.508	30.830	2.501	11.98	1
77		2022	8.91	318.421.580	33.474	2.635	12.09	0
77		2023	8.68	345.528.304	35.570	2.827	12.10	0
77		2024	8.44	347.405.643	37.631	2.997	12.11	0
78	Pandeglang	2018	9.61	229.357.865	26.184	2.456	13.42	0
78		2019	9.42	264.064.732	28.017	2.595	13.46	0
78		2020	9.92	266.266.569	28.371	2.519	13.47	0
78		2021	10.72	270.986.700	29.870	2.508	13.49	1
78		2022	9.32	293.752.641	32.076	2.489	13.72	0
78		2023	9.27	323.136.298	34.017	2.528	13.73	0
78		2024	9.18	330.725.086	35.905	2.787	13.74	0
79	Serang	2018	4.30	227.750.343	71.522	2.998	12.39	0
79		2019	4.08	260.671.405	77.017	3.203	12.43	0
79		2020	4.94	261.898.051	75.881	3.238	12.57	0
79		2021	5.49	268.531.178	80.231	3.288	12.58	1
79		2022	4.96	298.378.779	87.982	3.116	12.78	0
79		2023	4.85	316.473.229	95.079	3.282	12.86	0
79		2024	4.51	325.551.426	102.120	3.485	12.87	0
80	Tangerang	2018	5.18	241.697.257	129.826	5.878	12.80	0
80		2019	5.14	280.581.836	140.366	5.743	12.81	0
80		2020	6.23	291.455.144	135.732	5.860	12.82	0
80		2021	7.12	301.280.535	145.284	6.096	12.84	1
80		2022	6.92	315.980.612	160.165	6.708	12.85	0
80		2023	6.93	329.904.517	173.301	7.890	12.87	0
80		2024	6.55	350.034.471	186.104	8.714	12.88	0

Lampiran 2 Hasil Uji Common Effect

Dependent Variable: PK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/17/26 Time: 19:33

Sample: 2018 2024

Periods included: 7

Cross-sections included: 80

Total panel (balanced) observations: 560

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-27.94938	7.591420	-3.681706	0.0003
LOG(DD)	5.040409	0.472135	10.67578	0.0000
LOG(PDRB)	-1.566555	0.277339	-5.648527	0.0000
LOG(PP)	-4.178590	0.696179	-6.002175	0.0000
HLS	-0.705897	0.176724	-3.994355	0.0001
COVID_19	0.590749	0.326277	1.810576	0.0707
Root MSE	2.677012	R-squared		0.392616
Mean dependent var	10.98793	Adjusted R-squared		0.387134
S.D. dependent var	3.438006	S.E. of regression		2.691469
Akaike info criterion	4.828708	Sum squared resid		4013.180
Schwarz criterion	4.875079	Log likelihood		-1346.038
Hannan-Quinn criter.	4.846815	F-statistic		71.62154
Durbin-Watson stat	0.070254	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Olah Data Eviews 12

Lampiran 3 Hasil Uji Fixed Effect

Dependent Variable: PK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/17/26 Time: 15:02

Sample: 2018 2024

Periods included: 7

Cross-sections included: 80

Total panel (balanced) observations: 560

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.99175	4.114831	3.400322	0.0007
LOG(DD)	1.065375	0.263913	4.036841	0.0001
LOG(PDRB)	-1.375574	0.242364	-5.675657	0.0000
LOG(PP)	-0.398637	0.198676	-2.006467	0.0454
HLS	-0.462143	0.182430	-2.533259	0.0116
COVID_19	0.843932	0.054455	15.49774	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.393091	R-squared	0.986904
Mean dependent var	10.98793	Adjusted R-squared	0.984588
S.D. dependent var	3.438006	S.E. of regression	0.426816
Akaike info criterion	1.274021	Sum squared resid	86.53153
Schwarz criterion	1.930940	Log likelihood	-271.7258
Hannan-Quinn criter.	1.530531	F-statistic	426.1276
Durbin-Watson stat	1.721282	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Olah Data Eviews 12

Lampiran 4 Hasil Uji Random Effect

Dependent Variable: PK

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/17/26 Time: 19:36

Sample: 2018 2024

Periods included: 7

Cross-sections included: 80

Total panel (balanced) observations: 560

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.64547	4.022244	2.895267	0.0039
LOG(DD)	1.294504	0.254474	5.086989	0.0000
LOG(PDRB)	-1.566481	0.216281	-7.242817	0.0000
LOG(PP)	-0.438360	0.197781	-2.216395	0.0271
HLS	-0.441430	0.164074	-2.690436	0.0074
COVID_19	0.826883	0.054003	15.31190	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.686851	0.9754
Idiosyncratic random			0.426816	0.0246
Weighted Statistics				
Root MSE	0.429333	R-squared		0.467982
Mean dependent var	0.658540	Adjusted R-squared		0.463181
S.D. dependent var	0.589141	S.E. of regression		0.431651
Sum squared resid	103.2229	F-statistic		97.46371
Durbin-Watson stat	1.432993	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				

R-squared	0.292658	Mean dependent var	10.98793
Sum squared resid	4673.628	Durbin-Watson stat	0.031649

Sumber: Olah Data Eviews 12

Lampiran 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	272.843825	(79,475)	0.0000
Cross-section Chi-square	2148.624968	79	0.0000

Sumber: Olah Data Eviews 12

Lampiran 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1512.910 (0.0000)	1.467417 (0.2258)	1514.377 (0.0000)
Honda	38.89614 (0.0000)	-1.211370 (0.8871)	26.64716 (0.0000)
King-Wu	38.89614 (0.0000)	-1.211370 (0.8871)	9.166267 (0.0000)
Standardized Honda	39.96897 (0.0000)	-0.786365 (0.7842)	23.54559 (0.0000)
Standardized King-Wu	39.96897 (0.0000)	-0.786365 (0.7842)	7.346952 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	1512.910 (0.0000)

Sumber: Olah Data Eviews 12

Lampiran 7 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	5	1.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(DD)	1.065375	1.294504	0.004893	0.0011
LOG(PDRB)	-1.375574	-1.566481	0.011963	0.0809
LOG(PP)	-0.398637	-0.438360	0.000355	0.0350
HLS	-0.462143	-0.441430	0.006360	0.7951
COVID_19	0.843932	0.826883	0.000049	0.0149

Sumber: Olah Data Eviews 12

Lampiran 8 Hasil Intercept

NO	Effect
1	-2.850335
2	-2.872050
3	-1.598870
4	-3.268002
5	-1.271332
6	-0.163296
7	-1.483563
8	1.670657
9	-0.819151
10	0.343499
11	-0.635361
12	-1.943181
13	-2.018113
14	-3.790487
15	-1.203308
16	-1.289122
17	-0.655301
18	-3.344629
19	2.799694
20	2.211639
21	-3.085825
22	-0.167327
23	-1.323465
24	4.977594
25	1.344845
26	0.823032
27	0.196888
28	-4.438684
29	-0.290790

30	5.168185
31	-1.162717
32	1.520618
33	-1.694442
34	-0.633758
35	-1.708088
36	-2.181167
37	3.474901
38	3.302832
39	-0.546970
40	2.602927
41	-3.015231
42	2.356523
43	-2.491673
44	-3.648582
45	-2.559546
46	-0.588931
47	4.170484
48	7.243618
49	-2.091737
50	-1.973527
51	2.310990
52	2.020076
53	2.657709
54	-0.168918
55	-1.435256
56	-0.046228
57	2.198033
58	-2.035580
59	-0.388306
60	-1.196984

61	0.020747
62	0.040264
63	-0.301831
64	2.892977
65	2.062136
66	2.611706
67	-0.388661
68	-1.739297
69	6.020321
70	9.639263
71	-2.294594
72	0.602853
73	8.120886
74	-0.532362
75	4.600147
76	-3.796873
77	-3.073126
78	-1.599380
79	-5.440313
80	-2.759773

Sumber: Olah Data Eviews 12